

**KEMAMPUAN ANGGARAN KEUANGAN DAERAH
DALAM MENGHADAPI OTONOMI
DI KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2006**

**KEMAMPUAN ANGGARAN KEUANGAN DAERAH
DALAM MENGHADAPI OTONOMI
DI KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata I
Program Studi Ekonomi Pembangunan,
pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Sunu Harmoko
Nomor Mahasiswa : 01 313 116
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2006**

PERNYATAN BEBAS PLAGIARISME

“Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FE UII. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”



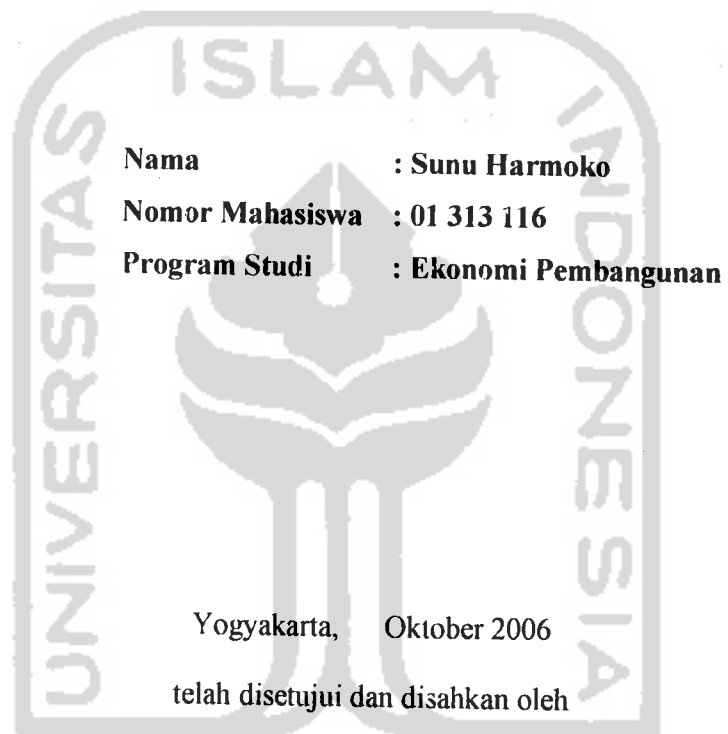
Yogyakarta, November 2006

Penulis

Sunu Harmoko

PENGESAHAN

KEMAMPUAN ANGGARAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENGHADAPI OTONOMI DI KOTA YOGYAKARTA



Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Edy Suandi Hamid M.Ec

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

**KEMAMPUAN ANGGARAN KEUANGAN DAERAH
DALAM MENGHADAPI OTONOMI
DI KOTA YOGYAKARTA**

Disusun oleh : **SUNU HARMOKO**
Nomor mahasiswa : **01313116**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 20 November 2006

Penguji/Pembimbing Skripsi : Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec

Penguji I : Drs. Akhsyim Afandi, MA

Penguji II : Drs. Moh. Bekti Hendrie Anto, M.Sc



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Dr. Asmai Ishak, M.Bus, Ph.D.

HALAMAN MOTTO

Jadikanlah Sholat dan sabar sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian adalah berat kecuali bagi orang-orang yang kfiusu'
(QS. Al Baqarah : 45)

"Berbagialah selalu dengan hidupmu; karena, hidup memberimu kesempatan; untuk mencintai dan dicintai; untuk belajar; untuk bermain; dan memiliki impian-impian untuk dicapai"
(Hebry Van Dyke)

"Jadilah dirimu sendiri pada setiap tantangan yang akan dan sedang kamu hadapi, hadapi dengan sepenuh hati"

PERSEMBAHAN

Segala Puji bagi Allah SWT, atas rahmat-Nya karya sederhana ini dapat terselesaikan

Karya ini merupakan salah satu bentuk dharma baktiku kepada

Ayahanda dan Ibunda

Terimakasih atas do'a dan segala yang telah berikan

Pelita hidup yang tidak pernah padam, tauladan hidup terhebat

Sungguh karunia terbesar bagi ananda telah menjadi bagian hidup bapak dan ibu (mohon maaf jika selama ini banyak salah)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbilalamin, segala rasa syukur penulis panjatan ke hadirat Allah SWT, akhirnya tugas penulis sebagai mahasiswa dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini dapat selesai atas bantuan dari berbagai pihak, yang bukan saja dari kerelaan waktu dan tenaganya telah membantu penulis, tetapi juga dengan segenap hati, jiwa dan cinta yang tulus, yang Insya Allah hanya terbalas oleh-Nya. Dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Jaka Sriyana. Drs, M.Si., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Indonesia.
2. Segenap Dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, atas dukungan dan bimbingannya selama penulis menempuh kuliah ini.
3. Bapak Edy Suandi Hamid, Prof. Dr. M.Ec Dosen Pembimbing Skripsi atas segala sikap yang penuh kesabaran, dorongan semangat, bantuan, dan senyum yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-temanku satu perjuangan (Arif, Yantok, Rizal, Kabol, Nuno, Mel, Yanti, Citra, DB, Jarmen, Teman-teman satu angkatan kelas B, Anak-anak KUTAS, Edo, April, Mas Eko, Epi, Ivana, dan Temen-teman terimakasih atas dukungan dan doanya selama ini. Tetaplah menjadi sahabat yang menyenangkan hingga nanti.

Semua pihak yang tanpa sengaja belum tersebut disini, terimakasih. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan

kesalahan. Semoga karya sederhana ini dapat memberi sumbangan yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, Oktober 2006

Penulis

Sunu Harmoko



DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul Sampul Depan	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Berita Acara Ujian.....	v
Halaman Motto	vi
Halaman Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Abstrak	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Alasan Pemilihan Judul	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN	8
2.1 Letak Geografi.....	8
2.2 Pemerintahan	9
2.3 Penduduk dan Tenaga Kerja	10
2.4 Sosial	11
2.5 Pertanian	13
2.6. Industri, Listrik, dan Air Minum.....	16
2.7 Perekonomian.....	17
2.8 Komunikasi Dan Transportasi.....	19
2.9 Keuangan dan Harga-harga.....	21
BAB III Kajian Pustaka.....	23
BAB IV LANDASAN TEORI.....	29
4.1 Otonomi Daerah	29
4.2 Desentralisasi dan Keuangan daerah	30
4.3 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.....	33
4.3.1 Pendapatan Asli Daerah.....	33
4.3.2 Dana Perimbangan.....	35
4.3.3 Pinjaman Daerah.....	36
4.4 Pentingnya Anggaran Keuangan Daerah.....	38
4.4.1 Anggaran sebagai Alat perencanaan.....	39
4.4.2 Anggaran Sebagai Alat Pengendalian	40
4.4.3 Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal.....	41

4.4.4 Anggaran Sebagai Alat politik	41
4.4.5 Anggaran Sebagai Alat koordinasi dan Komunikasi.....	42
4.4.6 Anggaran Sebagai Penilai kinerja.....	42
4.4.7 anggaran Sebagai Motivasi.....	43
4.5 Kapasitas Fiskal dan Kebutuhan Fiskal dalam Otonomi Daerah	43
BAB V METODE PENELITIAN	54
5.1 Data yang diperlukan.....	55
5.2 Metode Analisis Data	55
5.3 Definisi Operasional.....	55
5.4 Alat Analisis Data.....	57
5.4.1 Derajat Desentralisasi Fiskal	57
5.4.2 Kebutuhan Fiskal (<i>fiscal need</i>).....	58
5.4.3 kapasitas Fiskal (<i>fiscal capacity</i>).....	59
BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN	61
6.1 Derajat Desntralisasi Fiskal	61
6.2 Kebutuhan Fiskal.....	66
6.3 Kapasitas Fiskal.....	69
BAB VII KESIMPULAN DAN IMPLIKASI.....	74
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	79

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
Tabel 6.1	Data PAD,BPHBP,B pemerintah kota Yogyakarta Tahun 1999-2004.....	61
Tabel 6.2	DF PAD,DF BHPBP,DF B Tahun 1999-2004.....	62
Tabel 6.3	Pertumbuhan Rasio PAD, dan B terhadap TPD.....	65
Tabel 6.4	Perbandingan kebutuhan Fiskal kota Yogyakarta dengan Rata-rata kebutuhan Fiskal kabupaten/kotaDi Propinsi DIY.....	67
Tabel 6.5	Perbandingan Pertumbuhan kebutuhan Fiskal kota Yogyakarta dengan Rata-rata kebutuhan Fiskal kabupaten/kotaDi Propinsi DIY.....	68
Tabel 6.6	Perbandingan Kapasitas Fiskal kota Yogyakarta dengan Rata-rata kapasitas Fiskal kabupaten/kotaDi Propinsi DIY.....	69
Tabel 6.7	Perbandingan Pertumbuhan kapasitas fiskal kota Yogyakarta Dengan rata-rata kapasitas fiskal kabupaten/kota di Propinsi DIY.....	72
Tabel 6.8	Perbandingan kapasitas dan kebutuhan fiskal kota Yogyakarta..	73

ABSTRAK

KEMAMPUAN ANGGARAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENGHADAPI OTONOMI DI KOTA YOGYAKARTA

Skripsi yang berjudul Kemampuan Anggaran Keuangan Daerah Dalam Menghadapi Otonomi Di Kota Yogyakarta. Data yang diperlukan berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kantor Badan Pusat Statistik (BPS) dan RAPBD Kota Yogyakarta.

Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Mengetahui dan mengukur kemampuan anggaran keuangan daerah terhadap pembiayaan Belanja Daerah Kota Yogyakarta tahun 2004 yang ditekankan pada derajat desentralisasi fiskal, kemampuan fiskal, dan kapasitas Fiskal. Mengetahui dan menganalisis kemampuan keuangan daerah Kota Yogyakarta dalam menghadapi otonomi daerah.

Kesimpulan yang diperoleh adalah Peranan PAD dalam struktur penerimaan APBD masih sangat kecil dan setelah dilaksanakannya otonomi dapat diketahui bahwa kota Yogyakarta semakin mengalami ketergantungan anggaran keuangan .

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu unsur reformasi total adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas terhadap daerah kabupaten dan kota. Tuntutan itu wajar, paling tidak untuk dua alasan. Pertama, intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa lalu yang telah menimbulkan masalah rendahnya kredibilitas dan efektifitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah (Mardiasmo, 2002: 4).

Arahan tersebut yang terlalu besar dari pemerintah pusat tersebut menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati, sehingga pemerintah daerah seringkali menjadikan pemenuhan peraturan sebagai tujuan, dan bukan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Besarnya arahan dari pemerintah pusat itu didasarkan kepada dua alasan utama, yaitu untuk menjamin stabilitas nasional, dan karena kondisi sumber daya daerah yang dirasa masih relatif lemah.

Kedua, tuntutan pemberian otonomi juga muncul sebagai jawaban untuk memasuki *era new game* yang membawa *new rules* pada semua aspek kehidupan manusia di masa datang. Di era globalisasi ini, pemerintah akan semakin kehilangan kendali pada banyak persoalan, seperti pada pandangan internasional, informasi dan ide, serta transaksi keuangan (Mardiasmo, 2002:4)

Dalam pelaksanaan pembangunan suatu daerah membutuhkan anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk pembiayaan anggaran belanja daerah. Besarnya anggaran yang dimiliki oleh suatu daerah baik Propinsi maupun Kabupaten dan Kota adalah merupakan kesempatan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dengan melibatkan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

Dalam mengisi dan melaksanakan pembangunan, masalah keuangan merupakan masalah pokok pemerintah, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang harus dilakukan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, meningkatnya pendapatan perkapita dan taraf hidup masyarakat, merupakan faktor-faktor yang menjadi tantangan bagi masyarakat dan pemerintah. Hal ini akan menyebabkan pengeluaran pemerintah yang cukup tinggi. Di lain pihak sumber penerimaan yang terbatas harus diusahakan untuk menutupi kebutuhan tersebut.

Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri (Kaho,1998:124). Kemampuan daerah yang dimaksud adalah sampai seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangannya sendiri guna membiayai kebutuhan daerah tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat.

Setiap daerah di Indonesia memiliki permasalahan yang relatif hampir sama dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, kemampuan

suatu daerah menjadi daerah otonom dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu: ketersediaan sarana dan prasarana, pembiayaan dan personalia yang memadai menurut Mardiasmo (2000:1) yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah untuk mewujudkan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan manajemen keuangan daerah yang mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Kemampuan anggaran keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah. PAD selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah terhadap pusat. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap APBD maka akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab.

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaksanakan Undang-undang otonomi daerah. Sebagai kota yang letaknya sangat strategis di tengah propinsi harus memiliki sumber anggaran keuangan yang memadai disamping alasan tingginya tingkat intensitas pembangunan yang dilaksanakan, baik dari segi pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan perkantoran dan rumah dinas, pengadaan mega mall, pengadaan kendaraan operasional serta pengadaan peralatan

kantor serta pengadaan barang publik lainnya untuk kelancaran aktivitas birokrasi, tentu didukung oleh kemampuan anggaran keuangan yang besar.

Adapun menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini bahwa untuk menjadi daerah otonom yang sesungguhnya maka salah satu unsur penting diperlukan sumber keuangan yang cukup, oleh karena itu perlu dilakukan analisis terhadap realita kondisi keuangan daerah pada Kota Yogyakarta.

Di sisi lain sangat disadari bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki potensi penerimaan yang berbeda, karena adanya perbedaan potensi sumber daya, tingkat ekonomi, dan karakteristik sosial budaya. Perbedaan seperti ini menjadikan hasil yang penelitian yang dilakukan di daerah tertentu sulit untuk membedakan persoalan yang sama di daerah lain. Dengan demikian, khusus untuk Kota Yogyakarta perlu dilakukan penelitian tersendiri untuk mendapatkan gambaran relatif lebih lengkap mengenai kemampuan daerah menjadi daerah otonom.

Berdasarkan deskripsi dan uraian tersebut penulis merasa tertarik untuk menelaah dan meneliti tentang “KEMAMPUAN ANGGARAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENGHADAPI OTONOMI DI KOTA YOGYAKARTA”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana derajat desentralisasi fiskal kota Yogyakarta?
2. Bagaimana kebutuhan fiskal kota Yogyakarta?
3. Bagaimana kapasitas fiskal kota Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui derajat desentralisasi fiskal kota Yogyakarta.
2. Mengetahui kebutuhan fiskal kota Yogyakarta.
3. Mengetahui kapasitas fiskal kota Yogyakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai :

1. Bagi pemerintah diharapkan dapat menjadi tambahan informasi sekaligus bahan evaluasi agar lebih memantapkan peran pemerintah dalam penyusunan anggaran.

2. Dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang berminat pada masalah keuangan daerah.
3. Bagi penulis ini merupakan hasil aplikasi serta penerapan langsung dari salah satu analisis yang di dapat dari bangku kuliah.

1.5 Sistematika Penelitian

Bagian ini mengemukakan hal-hal apa saja yang akan di kemukakan sebagai isi dari bab-bab selanjutnya.

Bab I : Pendahuluan

Unsur-unsur pokok yang dimuat dalam bab pendahuluan ini adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II : Tinjauan Umum Subyek Penelitian

Bab ini merupakan uraian atau deskripsi secara umum atas subyek penelitian, dilakukan dengan merujuk fakta pada data yang bersifat umum sebagai pemahaman secara makro.

Bab III : Kajian Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang pendokumentasian dan pengkajian dari hasil penelitian-penelitian yang pernah dilakukan. Dari proses ini ditemukan kekurangan pada penelitian yang lalu, sehingga dapat dijelaskan di mana letak hubungan, perbedaan maupun posisi penelitian dengan peneliti tersebut.

Bab IV : Landasan Teori

Bab ini berisi tentang teori yang digunakan untuk mendekati masalah yang akan diteliti untuk mencari hubungan antar variabel yang terlibat dalam permasalahan yang diangkat, menjelaskan secara implisit yang muncul pada landasan teori, namun belum formal sebagai pernyataan yang siap diuji juga penerapan yang bersifat baku.

Bab V : Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

Bab VI : Analisis dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian. Jika hasil penelitian secara keseluruhan atau sebagian baik sesuai atau tidak sesuai dengan teori maupun harapan umum yang berlaku, maka peneliti harus memberi penjelasan mengenai bagaimana hal tersebut terjadi.

Bab VII : Simpulan dan Implikasi.

Bab ini berisi simpulan-simpulan yang langsung diturunkan dari analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, serta jawaban atas rumusan masalah. Serta implikasi muncul sebagai hasil dari simpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah, sehingga dapat ditarik implikasi teoritis penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Obyek penelitian adalah Kota Yogyakarta. Berikut diuraikan gambaran umum Kota Yogyakarta berdasarkan data Kota Yogyakarta dalam Angka yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Yogyakarta tahun 2004.

2.1. GEOGRAFI

2.1.1. Keadaan Alam

Kota Yogyakarta terletak antara 110° 24'19"-110° 28'53" Bujur Timur dan antara 07° 49'26" Lintang selatan, dengan luas wilayah sekitar 32,5 Km² atau 1.02% dari luas wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta. Jarak terjauh dari utara ke Selatan kurang lebih 7,5 km dan dari Barat ke Timur kurang lebih 5,6 Km.

Kota Yogyakarta yang terletak didaerah dataran lereng aliran gunung Merapi memiliki kemiringan lahan yang relatif datar (antara 0 – 2 %) dan berada pada ketinggian rata-rata 114 meter dari permukaan laut (dpa). Sebagian wilayah dengan luas 1.657 hektar terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dan sisanya (1.593 hektar) berada pada ketinggian antara 100 – 199 meter dpa.

Sebagian besar jenis tanahnya adalah regosol. Terdapat 3 sungai yang mengalir dari arah Utara ke Selatan yaitu:

Sungai Gajahwong yang mengalir di bagian timur kota, Sungai Code dibagian tengah dan Sungai Winongo dibagian barat kota.

Secara administratif kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45

kelurahan dengan batas wilayah:

Sebelah Utara : kabupaten Sleman

Sebelah Timur : kabupaten Bantul dan Sleman

Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul

Sebelah Barat : Kabupaten Bantul dan Sleman

2.1.2 Iklim

Secara umum, rata-rata curah hujan tertinggi selama tahun 2004 terjadi pada bulan desember , yaitu sebanyak 271 mm dan terendah terjadi pada bulan Agustus (0 mm). Rata-rata hari hujan per bulan adalah 6,66 hari. Kelembapan udara rata-rata cukup tinggi, tertinggi terjadi pada bulan September sebesar 93% dan terendah pada bulan Oktober sebesar 72%. Tekanan udara rata-rata 1.011,0 mb. Dan suhu rata-rata 26,9 C.

2.2 PEMERINTAHAN

2.2.1 Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah adalah kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah. Pemerintah Kota Yogyakarta dipimpin oleh seorang walikota sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Walikota. Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) adalah Badan Legislatif Daerah. DPRD Kota Yogyakarta masa bhakti 2004-2009 terdiri dari 35 anggota berasal dari 5 fraksi.

2.2.2 Pembagian Wilayah

Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan, 45 kelurahan, 610 RW dan 2.512 RT dengan luas wilayah 32,5 km². Penggunaan lahan paling banyak diperuntukkan bagi perumahan, yaitu sebesar 2.103,272 hektar dan bagian terkecil berupa lahan kosong seluas 24,781 hektar.

2.3 PENDUDUK DAN TENAGA KERJA

2.3.1 Penduduk

Berdasarkan hasil sensus penduduk 2000, penduduk kota Yogyakarta berjumlah 397.398 orang yang terdiri dari 194.530 orang (48,95 persen) laki-laki dan 202.868 (51,05 persen) perempuan. Jumlah penduduk berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1990 sebanyak 412.059 orang. Dengan demikian rata-rata pertumbuhan penduduk periode tahun 1990-2000 sebesar -37%.

Berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk 2000 jumlah penduduk tahun 2004 tercatat 398.004 orang. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah 27,87 persen laki-laki dan 52,13 persen perempuan. Secara keseluruhan jumlah penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki seperti tampak dari rasio jenis kelamin penduduk yang lebih kecil dari 100. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan.

Dengan luas wilayah 32,50 km², kepadatan penduduk Kota Yogyakarta 12.246 jiwa per km².

2.3.2 Tenaga Kerja

Jumlah pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarta pada tahun 2004 tercatat 9.475 orang, yang terdiri dari 88,38 persen pegawai pemerintah daerah dan 11,62 persen pegawai pemerintah pusat. Berdasarkan golongan kepangkatan, di kota Yogyakarta terdapat pegawai negeri sipil daerah golongan I 2,08 persen, golongan II 22,15 persen, golongan III 54,46 persen dan sisanya golongan IV 21,31 persen.

Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2004 sebanyak 18.964 orang yang terdiri dari 10.907 laki-laki dan 8.057 perempuan. Sebagian besar dari pencari kerja tersebut berpendidikan sarjana yaitu 61,34 persen, kemudian diikuti yang berpendidikan SMU (26,72 persen), Diploma (9,86 persen) dan sisanya berpendidikan S2, SMTP, dan SD.

2.4 SOSIAL

2.4.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Untuk itu perlu didukung dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga pengajar yang memadai. Pada tingkat pendidikan pra sekolah dan menengah sebagian besar diselenggarakan oleh

pihak swasta. Sedangkan untuk tingkat pendidikan dasar lebih banyak diselenggarakan oleh pemerintah.

Pada tahun ajaran 2004/2005 di Kota Yogyakarta terdapat 50 perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi tersebut terdiri dari 8 universitas 10 institut/sekolah tinggi dan 32 akademi. Jumlah dosen sebanyak 4.980 orang yang terdiri dari 4.636 orang dosen yayasan dan 344 orang dosen DPK. Jumlah mahasiswa yang terdaftar sebanyak 76.071 orang.

2.4.2 Kesehatan

Ketersediaan sarana Kesehatan dan tenaga kesehatan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pada tahun 2004 jumlah dokter praktek di kota Yogyakarta mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 786 orang pada tahun 2003 menjadi 1.004 orang pada tahun 2004. Jumlah apotek dan pedagang besar farmasi masing-masing adalah 112 dan 24. Untuk menekan pertumbuhan penduduk pemerintah mencanangkan program Keluarga Berencana (KB). Respon masyarakat terhadap program tersebut cukup positif. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah penduduk yang aktif menjadi akseptor. Pada tahun 2004 jumlah akseptor tercatat 35.638 orang atau 76,35 persen dari pasangan usia subur (PUS) yang terdapat di kota Yogyakarta. Alat kontrasepsi yang banyak digunakan adalah IUD (35,99 persen).

2.4.3 Sosial lainnya

Jumlah anak yatim piatu yang diasuh dalam panti pada tahun 2004 sebanyak 618 anak yang terdiri dari 382 anak laki-laki dan 236 anak perempuan. Jumlah penderita cacat tercatat 2.502 orang. Pada tahun 2003 orang terlantar berjumlah 327 orang dan pada tahun 2004 meningkat menjadi 392.

2.5 PERTANIAN

2.5.1 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan dibedakan menjadi lahan sawah dan lahan bukan sawah. Lahan bukan sawah meliputi lahan untuk bangunan dan sekitarnya, tegal/kebun, tambak, kolam/tebat/empang, lahan yang sementara tidak diusahakan, lahan untuk tanaman kayu-kayuan dan perkebunan negara/swasta. Pada tahun 2004 luas penggunaan lahan di kota Yogyakarta tercatat 3.250 hektar, terdiri dari 123 hektar lahan sawah dan 3.127 hektar lahan bukan sawah.

2.5.2 Tanaman Pangan

Data tanaman pangan meliputi tanaman padi, palawija dan buah-buahan. Luas panen tanaman padi sawah pada tahun 2004 mencapai 146 hektar dengan produksi 838 ton gabah kering giling. Dibandingkan tahun sebelumnya, produksi padi sawah mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena adanya penurunan luas panen. Produksi palawija yang terdiri dari

jagung dan kacang tanah pada 2004 masing-masing 98,00 ton dan 30,02 ton, dengan luas panen 25 hektar untuk tanaman jagung dan 32 hektar untuk tanaman kacang tanah. Dibandingkan dengan tahun 2003, produksi jagung meningkat 60,18 persen, sedangkan produksi kacang tanah turun 11,31 persen. Kenaikan produksi jagung disebabkan adanya kenaikan luas panen dan produktivitasnya sedangkan penurunan produksi kacang tanah disebabkan oleh penurunan luas panen dan produktivitas.

Tanaman buah-buahan yang paling banyak terdapat di Kota Yogyakarta adalah pepaya. Pada tahun 2004 populasi pohon pepaya sebanyak 19,8 ribu pohon dengan populasi pohon pepaya sebanyak 464,2 ton.

2.5.3 Tanaman Perkebunan

Komoditi perkebunan tidak cukup potensial untuk wilayah Kota Yogyakarta. Tanaman perkebunan yang paling dominan adalah kelapa. Pada tahun 2004 populasi tanaman kelapa sebanyak 7.657 pohon dan 6.961 pohon diantaranya sudah menghasilkan dengan total produksi 87,72 ton.

2.5.4 Perikanan

Produksi perikanan pada tahun 2004 tercatat 999 kuintal yang terdiri dari 128 kuintal hasil penangkapan di perairan umum, 188 kuintal perairan sawah, 656 kuintal perikanan kolam dan 27 kuintal produksi ikan dalam karamba. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya produksi perikanan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Penurunan terjadi pada

produksi ikan di dalam karamba, sedangkan budidaya ikan mengalami kenaikan. Produksi benih ikan juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2003 produksi benih ikan tercatat 907 ribu ekor dan pada tahun 2004 menjadi 981 ribu ekor atau naik sebesar 8,15 persen. Peningkatan ini terjadi pada benih ikan gurameh yang diproduksi oleh usaha pembenihan rakyat.

2.5.5 Peternakan

Populasi ternak besar yang terdiri dari kerbau, sapi potong, sapi perah dan kuda pada tahun 2004 secara berturut-turut adalah 13 ekor, 219 ekor, 46 ekor dan 32 ekor. Sementara itu populasi kambing, domba, babi, dan kelinci yang dikelompokkan sebagai ternak kecil berturut-turut adalah 211 ekor, 597 ekor, 235 ekor, dan 96 ekor. Populasi ternak kecil paling banyak terdapat di kecamatan Kotagede. Populasi unggas yang terdiri dari burung puyuh, ayam petelur, ayam pedaging, ayam buras, dan itik berturut-turut adalah 3000 ekor, 4500 ekor, 73.602 ekor dan 1.070 ekor. Jumlah pemotongan ternak pada tahun 2003 tercatat 10.902 ekor sapi, 3.881 ekor kambing, 7.122 ekor domba, dan 4.263 ekor babi. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa jumlah ternak yang paling banyak dipotong adalah ternak sapi. Produksi telur tercatat mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2003 yang mencapai 1.445,8 ribu butir, atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2003 yang mencapai 3.845,8 butir.

2.6 INDUSTRI, LISTRIK DAN AIR MINUM

2.6.1 Industri

Industri dibedakan atas industri besar, sedang, kecil dan rumah tangga. Industri besar adalah industri dengan jumlah tenaga kerja 100 orang atau lebih dan industri sedang adalah industri dengan jumlah tenaga kerja antara 20-99 orang. Perusahaan besar dan sedang di Yogyakarta pada tahun 2004 sebanyak 110 perusahaan dengan 8.562 tenaga kerja. Dibandingkan dengan tahun 2003 jumlah perusahaan industri besar dan sedang mengalami penurunan sebesar 1,78 persen.

Informasi mengenai industri kecil diperoleh dari Dinas Perekonomian Kota Yogyakarta. Pada tahun 2004 jumlah industri kecil tercatat 5.814 unit dengan jumlah tenaga kerja 30.143 dengan nilai investasi sebesar Rp. 148.487 juta. Dibandingkan dengan 2003 jumlah usahanya mengalami kenaikan sebesar 0,50 persen. Jumlah tenaga kerja yang terserap naik 0,88 persen dan nilai investasinya meningkat 1,57 persen. Industri kecil yang paling banyak adalah industri pengolahan hasil pertanian dan kehutanan.

2.6.2 Listrik

Jumlah pelanggan listrik PLN di kota Yogyakarta pada tahun 2004 tercatat 94.210 pelanggan. Berdasar data dari PLN Distribusi Jawa Tengah Cabang Yogyakarta, jumlah pelanggan tercatat 148.336. Namun jumlah tersebut termasuk pelanggan dari kecamatan Depok kabupaten Sleman dan kecamatan Banguntapan kabupaten Bantul. Mayoritas pelanggan adalah

rumah tangga yaitu sebesar 88,73 persen, dengan jumlah pemakaian 250.258.526 KWh atau 47,67 persen dari jumlah total pemakaian.

2.6.3 Air Minum

Berdasarkan data dari PDAM Tirtamarta, produksi air minum pada tahun 2004 mencapai 17.535.644 m³ atau naik 1,01 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Volume air yang disalurkan hanya 10.973.780 m³ atau 62,58 persen dari total produksi. Jumlah pelanggan pada tahun 2004 tercatat 34.627 pelanggan dan sebagian besar adalah kelompok non niaga yang terdiri dari rumah tangga dan instansi pemerintah. Kelompok pelanggan nonniaga berjumlah 32.387 pelanggan atau 93,53 persen dari total pelanggan, dengan rincian 31.299 pelanggan rumahtangga dan 1.088 instansi pemerintahan.

2.7 PEREKONOMIAN

2.7.1 Ekspor

Ekspor komoditas bukan migas Kota Yogyakarta pada tahun 2004 meningkat dibandingkan ekspor tahun sebelumnya, yaitu dari 39.418.773 US \$ di tahun 2003 menjadi 41.605.120 US \$ di tahun 2004. Sebagian besar ekspor Kota Yogyakarta berasal dari industri kerajinan tangan yang pada umumnya memiliki ciri khas dari suatu daerah sehingga sulit untuk ditiru dan menjadikan komoditas tersebut dapat bersaing di pasar Amerika maupun Eropa. Komoditas mebel kayu memiliki kontribusi terbesar dengan nilai total ekspor mencapai 19.916.415 US \$ atau 47,87 persen dari total

ekspor Kota Yogyakarta. Kontribusi terbesar kedua dimiliki oleh komoditas kulit disamak dengan nilai 6.712.159 US \$ atau mencapai 16,13 persen, dan komoditas sarung tangan golf menempati urutan ketiga dengan nilai ekspor mencapai 5.348.083 US \$ atau 12,85 persen.

2.7.2 Pasar

Pasar merupakan salah satu tempat kegiatan perekonomian masyarakat yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan dari suatu wilayah/daerah. Jumlah pasar yang terdapat di Kota Yogyakarta pada tahun 2004 mencapai 31 pasar yang menempati lahan seluas 108.122 m² dengan 13.242 pedagang. Dari keseluruhan pasar yang ada, sekitar 30 persen sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai sedangkan 70 persennya merupakan pasar tradisional dengan sarana dan prasarana yang masih sangat terbatas.

2.7.3 Koperasi

Koperasi yang merupakan sokoguru dari perekonomian, menjadi tumpuan kehidupan sebagian besar masyarakat Kota Yogyakarta. Jumlah koperasi yang terdapat di Kota Yogyakarta pada tahun 2004 sebanyak 450 koperasi dengan 54.019 anggota. Rasio jumlah anggota koperasi dengan jumlah rumah tangga di Kota Yogyakarta mencapai 39 persen, berarti menggambarkan bahwa masyarakat Kota Yogyakarta sangat tergantung pada koperasi. Pada tahun 2004 volume usaha koperasi mencapai 107.295 juta,

naik 33,75 persen dari tahun sebelumnya dengan sisa hasil usaha mencapai 5,119 juta rupiah.

2.8 KOMUNIKASI DAN TRANSPORTASI

2.8.1 Transportasi

Tersedianya prasarana /infrastruktur yang memadai merupakan salah satu modal dasar untuk meningkatkan kegiatan masyarakat suatu daerah, baik untuk kegiatan yang sifatnya sosial maupun kegiatan perekonomian. Salah satu prasarana/infrastruktur yang pokok adalah jalan . Makin meningkatnya usaha pembangunan menuntut pula peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar mobilitas penduduk dan memperlancar perdagangan antar daerah. Panjang jalan di seluruh wilayah Kota Yogyakarta pada tahun 2004 mencapai 246.724 km dengan rincian : 224.254 km jalan yang sudah diaspal dan 0.605 km jalan kerikil. Panjang jalan yang berada dibawah kewenangan negara 18.132 km, sedangkan 3.733 km berad adibawah kewenangan provinsi D.I..Yogyakarta dan 224.859 km berada dibawah kewenangan Kota Yogyakarta.

Kondisi jalan pada umumnya layak untuk dilalui, 20,60 persen kondisi jalan baik, 45,07 persen kondisi jalan sedang dan 34,33 persen kondisi jalan rusak. Untuk memenuhi transportasi darat, tersedia dua jenis kendaraan angkutan darat utama yaitu kendaraan bermotor dan kereta api. Pada tahun 2004, jumlah kendaraan bermotor roda empat atau lebih tercatat sebanyak 8.039 unit. Komposisinya pada tahun 2004 terdiri atas: 7,70 persen mobil

penumpang umum, 62,2 persen pick up, 9,67 persen truk, 18,37 persen kendaraan bis.

Angkutan kereta api yang ada di Kota Yogyakarta meliputi angkutan untuk penumpang dan angkutan untuk barang, yang terdiri dari dua stasiun yaitu stasiun Tugu yang khusus diperuntukkan bagi pemberangkatan penumpang kereta bisnis dan eksekutif, dan stasiun Lempuyangan yang diperuntukkan bagi pemberangkatan penumpang kereta ekonomi serta barang.

2.8.2 Pos dan Komunikasi

Jumlah warung telekomunikasi (wartel) dan kamar bicara umum (KBU) di wilayah Kota Yogyakarta pada akhir tahun 2004 ada sebanyak 5.935 buah, yang terbagi dalam tiga wilayah stasiun telepon otomatis. Di wilayah stasiun telepon otomatis Kotabaru terdapat 3.767 buah, pugeran 1.639 buah, dan Kentungan 529 buah. Sedangkan jumlah telepon umum yang ada di tiga wilayah stasiun otomatis tersebut mencapai 1.290 sambungan. Lalu lintas surat pos dan giri selama kurun waktu 2004 mencapai 9.613 ribu surat yang dikirim melalui kantor pos yang ada di wilayah Kota Yogyakarta. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya surat yang dikirim turun 46,58 persen.

Sarana komunikasi radio merupakan sarana komunikasi elektronik massal yang sampai saat ini masih banyak digemari masyarakat. Jumlah stasiun radio swasta di wilayah kota Yogyakarta pada tahun 2004 mencapai 13 stasiun, bertambah 2 stasiun radio dibandingkan tahun sebelumnya. Stasiun-stasiun tersebut tersebar di wilayah kecamatan Kota Yogyakarta

dengan kecamatan Pakualaman yang menjadi wilayah konsentrasi radio swasta.

2.9 KEUANGAN DAN HARGA-HARGA

2.9.1 Keuangan Daerah

Dalam era Otonomi Daerah , perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebaiknya menganut prinsip anggaran berimbang dan dinamis. Berimbang berarti harus diusahakannya keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran . Dinamis artinya makin meningkatnya jumlah anggaran dan tabungan pemerintah, sehingga kemampuan daerah bertambah dan ketergantungan pada bantuan akan berkurang. Pada tahun 2004 Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Yogyakarta mencapai 79.911 juta rupiah, meningkat 16,45 persen dari PAD tahun sebelumnya yaitu sebesar 68.622 juta rupiah. Namun demikian, dibandingkandengan total belanja daerah kontribusinya hanya 21,58 persen. Hal ini dapat dikatakan tingkat kemampuan daerah masih rendah dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja pemerintah Kota Yogyakarta.

2.9.2 Perbankan

Sampai dengan bulan Desember 2004 posisi kredit perbankan di Kota Yogyakarta mencapai 1.809.582 juta rupiah. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya posisi kredit naik 20,82 persen. Disisi lainjumlah aktiva bank di Kota Yogyakartajuga mengalami kenaikan dari 7.722.047 juta rupiah pada tahun 2003 menjadi 8.276.295 juta rupiah pada tahun 2004.

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

Telaah pustaka membahas tentang penelitian sebelumnya dan di jadikan sebagai sumber penulis untuk membahas tentang kemampuan keuangan daerah. Tujuan dari telaah pustaka adalah sebagai landasan teori untuk penelitian yang akan dikerjakan dan membandingkan hasil penelitian yang diperoleh sebelumnya, sehingga penelitian ini memiliki landasan yang kuat dan dapat mengetahui perbedaan yang diperoleh.

Penelitian mengenai kemampuan keuangan-keuangan pernah dilakukan. Dari beberapa penelitian yang ada dengan menggunakan variabel yang sama yang dikemukakan adalah Derajat Desentralisasi Fiskal , Kebutuhan Fiskal, dan Kapasitas Fiskal untuk mengukur tingkat kemampuan keuangan dan kemandirian suatu daerah, dan hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Yuliati

Menurut Yuliati (Abdul Alim, 2004:21), yang meneliti tentang “Kemampuan Keuangan Daerah dengan Studi Kasus Kabupaten Malang.” Keberhasilan otonomi daerah diperlukan persiapan pemerintah daerah disegala bidang, terutama kesiapan sumberdaya manusia yang mampu menjawab tantangan-tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk memberdayakan potensi daerah yang ada sehingga dari segi keuangan

yang merupakan unsur utama dalam menjalankan pemerintahan daerah dapat dicapai kemandirian.

Berdasarkan hasil penelitian dari sisi keuangan daerah disimpulkan sebagai berikut:

- a. Desentralisasi yang dihitung dari proporsi PAD terhadap APBD yang mencapai rata-rata sebesar 15% dan proporsi BHPBP terhadap PDRB sebesar 29%. Hal ini menunjukan ketergantungan pemerintah kabupaten terhadap pemerintah pusat sangat tinggi. Untuk dapat mencapai kemandirian dengan mengandalkan pada PAD saja, maka diperlukan waktu lebih kurang 7 tahun, sedangkan jika mengandalkan PAD+BHPBP maka diperlukan waktu lebih kurang 4 tahun.
- b. Dilihat dari kemampuan PAD dalam mendanai belanja rutin daerah maka rata-rata sebesar 32% dan jika ditambah dengan hasil dari bagi hasil pajak/bukan pajak mencapai 65%. Hal ini juga berindikasi bahwa dalam pembiayaan belanja rutin masih memerlukan bantuan dari pemerintah pusat.
- c. Kapasitas fiskal yang relatif baik dibandingkan dengan standar rata-rata kabupaten yang diteliti, dibandingkan dengan kebutuhan fiskalnya maka terdapat ketergantungan (*gap*) sebesar 12%. Jadi untuk menutupi kekurangan tersebut masih diperlukan dana dari pemerintah pusat.

2. Kifliansah

Berdasarkan analisa perkembangan realisasi anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD) kabupaten daerah tingkat II hulu sungai tengah, dengan menggunakan variabel yang sama yaitu Derajat Desentralisasi Fiskal, Kebutuhan Fiskal, dan Kapasitas Fiskal, secara garis besar dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut (Abdul Halim, 2004:329)

- a. Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) yang sebagian besar dananya masih bersumber dari alokasi pemerintah/instansi yang lebih tinggi (pemerintah pusat dan propinsi) mengindikasikan bahwa suatu daerah.
- b. Kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menopang pengeluaran baik belanja rutin maupun belanja pembangunan (belanja modal) yang relatif masih sangat rendah yaitu kurang dari 5% dari total pengeluaran, sehingga ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi.
- c. Dengan menggunakan Kapasitas Fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagian besar berasal dari pajak dan retribusi daerah, sedangkan bagian laba badan usaha milik daerah (BUMD) sumbangannya masih kecil terhadap pemerintah daerah berarti kemampuan untuk pembiayaan pembangunan masih mengalami ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

3. Nataludin

Menurut Nataludin dalam penelitiannya “ Potensi Perimbangan Pada Penerimaan Daerah Propinsi Jambi” yang menganalisis dengan menggunakan alat analisis kapasitas Fiskalnya memberikan kesimpulan bahwa :

- a. Pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah yang sangat rendah dengan persentase antara 2,31% sampai dengan 21,60% berarti daerah tersebut tidak mampu menjalani otonomi, tetapi tidak ada dana perimbangan
- b. Penerimaan daerah dengan dibantu dari dana perimbangan, memberikan kontribusi yang sangat besar pada penerimaan daerah, sehingga dana perimbangan ini juga dapat dijadiantambahan dana yang dapat menilai tingkat kemampuan daerah dalam membiayai keuangan (Abdul Halim, 2004:187).

4. Nirzawan

Kenyataan di era masa lalu pelaksanaan anggaran belum sepenuhnya mengarah oada kepentingan publik. Hal ini disebabkan karena sistem perencanaan penganggaran secara sentralistik yaitu peran pemerintah pusat sangat dominan. Hal ini menimbulkan permasalahan-permasalahan di daerah. Dengan keterbatasan kewenangan daerah khususnya dalam rangka penyelenggaraan keuangan daerah yang menyebabkan kurangnya kreatifitas dalam menggali potensi keuangan

daerahnya , sehingga mengakibatkan rendahnya Pendapatan Asli Daerah dan apabila dilihat kontribusi PAD terhadap total APBD sangatlah memprihatinkan dimana untuk kabupaten Bengkulu Utara hanya berkisar 5%. Hal ini mengindikasikan bahwa ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat sangat tinggi. Pengelolaan keuangan daerah seringkali diartikan sebagai mobilisasi sumber keuangan yang dimiliki oleh suatu daerah. Pandangan seperti ini terlalu menyederhanakan dan cenderung menghasilkan rekomendasi kebijakan yang reaktif dan sepihak. Bagi penganut pandangan otonomi daerah akan sulit terwujud karena dari segi kualitas, sumber sumber pembiayaan yang tersedia bagi daerah otonom sangat kurang, sedangkan dari sudut kuantitas sumber-sumber pembiayaan tersebut sangat sedikit. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan Daerah (Abdul halim, 2004:67)

5. Mardiasmo

Menurut Mardiasmo (2002:32), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa akuntabilitas keuangan daerah merupakan salah satu elemen kemampuan keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut. Selanjutnya ia menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan daerah adalah kewajiban pemerintah daerah untuk

memberikan pertanggung jawaban, menyajikan dan melaporkan (to report), serta mengungkapkan (to disclose) segala kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik (public money) kepada pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

6. Siti Aminah

Dalam penelitiannya Siti Aminah (2002) mengambil judul Kemampuan Anggaran Keuangan Daerah Sekayu Kabupaten Sumatera Selatan dalam mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah Periode 1998-2002. Peneliti ingin mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan keuangan daerah yang diukur dari PAD, TDP, DOF, RDAU, IKR dan Rasio ketergantungan.

Kemampuan daerah dapat dilihat dari besar kecilnya PAD yang diperoleh daerah yang bersangkutan dalam kaitannya dengan pemberian otonomi yang lebih besar kepada daerah. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD kepada APBD maka akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan kepada pusat. Pada tahun 2002, daerah Sekayu kabupaten Sumatera Selatan secara agregat mengalami pertumbuhan ekonomi dalam angka yang positif, meskipun belum sesuai dengan harapan masyarakat. Secara sektoral pertumbuhan ekonomi di daerah sekayu kabupaten Sumatera selatan menampakkan keadaan yang bervariasi. PDRB terbentuk dari kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Seiring perubahan dan perkembangan ekonomi terus terjadi sehingga distribusi

atau penyebaran PDRB kedalam sektor-sektor selalu mengalami perubahan.



BAB IV

LANDASAN TEORI

4.1. Otonomi Daerah

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari integral dari pembangunan nasional. Salah satu sasaran yang akhir-akhir ini mendapatkan perhatian dan prioritas adalah perkembangan dan kemandirian daerah dalam mengelola keuangan daerah guna dapat melaksanakan otonomi daerah secara luas dan nyata serta bertanggung jawab (Tabrani:www.google.com).

Untuk mengetahui apakah suatu daerah otonom mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, (Syamsi, 1986:199) menegaskan beberapa

Ukuran sebagai berikut:

1. Kemampuan Struktural Organisasi

Struktur organisasi pemerintah daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah dan ragam unit mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.

2. Kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah

Aparat pemerintah daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumahtangga daerah. Keahlian, moral,

disiplin dan kejujuransaling menunjang tercapainya tujuan yang diinginkan

3. Kemampuan Mendorong Partisipasi Masyarakat.

Pemerintah daerah harus mampu mendorong masyarakat agar memiliki

Kemauan untuk berperan serta dalam kegiatan pembangunan.

4. Kemampuan Keuangan Daerah

Pemerintah daerah harus mampu membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan dan masyarakat secara keseluruhan sebagai wujud pelaksanaan, pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Sumber-sumber pendapatan antara lain berasal dari PAD atau sebagian dari subsidi pemerintah pusat.

Tujuan otonomi daerah, dalam sebuah analisis yang dikemukakan oleh Syarif Hidayat dibedakan dari dua sisi kepentingan, yaitu kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari kepentingan pemerintah pusat tujuan utamanya adalah pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik, dan mewujudkan demokrasi sistem pemerintahan di daerah. (Mardiasmo, 2002:46)

4.2. Desentralisasi dan Keuangan Daerah

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan desentralisasi adalah adanya penyerahan sumber daya manusia, dan sumber perangkat fisiknya yang memadai untuk mendukung pelaksanaan urusan yang diserahkan kepada daerah. Permasalahannya adalah bukan jumlah dana yang memadai, tetapi seberapa jauh kewenangan daerah menentukan penggunaan sumber dana dan menggali sumber dana di daerah (Hamid,Edy Suandi 2006:123).

Mamesah (1995:16) mengemukakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang,demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pemerintah daerah sebagai sebuah institusi publik dalam kegiatan pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan memerlukan sumber dana atau modal untuk dapat membiayai pengeluaran pemerintah tersebut terhadap barang publik dan jasa pelayanan. Pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas ,nyata dan bertanggung jawab memerlukan dana yang cukup dan terus meningkat sesuai dengan meningkatnya tuntutan masyarakat, kegiatan pemerintah dan pembangunan. Dana tersebut diperoleh dari kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai sumber pembiayaan. Oleh karena itu , keuangan daerah merupakan tolak ukur bagi penentuan kapasitas dalam menyelenggarakan tugas-tugas otonomi, disamping tolak ukur lain

seperti kemampuan sumber daya alam ,kondisi demografi, potensi daerah, serta partisipasi masyarakat.

Menurut (Davey, K.J, 1988:185) bahwa desentralisasi sangat dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, dan budaya seperti :

1. Sampai seberapa jauh birokrasi politik lokal mendukung desentralisasi melalui pelimpahan organisasi dan tanggung jawabnya
2. Seberapa jauh perilaku, sikap dan budaya yang mendukung terciptanya iklim desentralisasi pengambilan keputusan dan pemerintahan.
3. Kebijakan dan program yang dirancang memadai untuk mendorong desentralisasi pengambilan keputusan dan manajemen pembangunan.
4. Sampai seberapa jauh tersedianya sumber dana atau keuangan yang memadai bagi organisasi yang mendapatkan pelimpahan tanggungjawab.

Faktor yang terakhir merupakan isu kebijaksanaan keuangan daerah yang menarik dalam rangka penyediaan barang publik secara berdaya guna dan berhasil guna. Mobilitas penyediaan barang publik daerah erat kaitannya dengan struktur peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang diarahkan pada penggalan potensi, investasi, dan bantuan.

Berdasarkan UU. No 33 Tahun 2004 BAB IV Pasal.4 asas desentralisasi, semua urusan pemerintah daerah baik mengenai pengeluaran belanja aparatur dan belanja pembangunan mengenai proyek-proyek pembangunan daerah harus dibiayai dari APBN. Tidak berarti bahwa pemerintah daerah harus mempunyai Penerimaan Asli Daerah (pajak dan retribusi daerah) yang mencukupi untuk segala pengeluaran tersebut, akan

tetapi dapat juga dari penerimaan daerah berupa subsidi atau bagi hasil dari pusat.

4.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan (atau pendapatan) di masa yang akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun. Disamping itu anggaran merupakan alat kontrol atau pengawasan terhadap baik tidaknya pengeluaran atau pendapatan di masa yang akan datang.

Pemahaman sistem dan mekanisme yang dianut oleh mekanisme APBD sama bagi APBN, dalam konteks perencanaan pembangunan dipahami hakikatnya merupakan bentuk operasional rencana kegiatan tahunan. APBN merupakan penjabaran repelita di tingkat Nasional dan APBD sebagai penjabaran di tingkat Daerah.

Dalam struktur APBD, komponen penerimaan daerah terdiri dari:

1. Bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu
2. Bagian Pendapatan Asli daerah (PAD)
3. Bagian Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah pusat dan atau pemerintah yang lebih tinggi
4. Bagian pinjaman pemerintah daerah.

4.3.1 Pendapatan Asli Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar. Akan tetapi,

saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah (Mardiasmo, 2002:146) antara lain :

1. Tingginya tingkat kebutuhan (*fiscal need*) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan *fiscal gap*.
2. Kualitas layanan yang masih memprihatinkan menyebabkan produk layanan publik yang sebenarnya dapat dijual ke masyarakat direspon secara negatif. Keadaan tersebut juga menyebabkan keengganan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi.
3. Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum.
4. Berkurangnya dana bantuan dari pusat (DAU dari pusat yang tidak mencukupi).
5. Belum diketahui potensi PAD yang mendekati kondisi riil.

Upaya peningkatan kapasitas fiskal (*fiscsal capacity*) sebenarnya tidak hanya menyangkut peningkatan PAD dan kemandirian. Peningkatan kapasitas fiskal pada dasarnya adalah optimalisasi sumber pada sumber penerimaan daerah. Oleh karena itu tidak perlu dibuat dikotomi antara Pendapatan Asli Daerah dengan Dana Perimbangan. Pemerintah sering kali dihadapkan pada masalah tingginya kebutuhan fiskal daerah sementara kapasitas fiskal daerah tidak mencukupi. Hal ini yang menyebabkan terjadi kesenjangan fiskal. Manajemen PAD terkait dengan upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah, sedangkan terhadap kebutuhan

fiskal daerah perlu dilakukan manajemen pengeluaran daerah secara komprehensif, salah satu caranya adalah dengan membuat standar biaya, dan pemanfaatan sumber-sumber ekonomi.

4.3.2 Dana Perimbangan

Dana perimbangan terdiri dari (Mardiasmo, 2002:133) :

1. Bagian daerah dari penerimaan Pajak Penghasilan Perseorangan, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam.

2. Dana Alokasi Umum

Sumber keuangan lainnya untuk pemerintah daerah berasal dari dana alokasi yang berasal dari pemerintah pusat yang dulunya di sebut sebagai dana subsidi atau ganjaran. Dana ini sesungguhnya berasal dari dana yang dikumpulkan dari berbagai hasil penerimaan PBB dan Bea Perolehan atas bumi dan bangunan. Dana alokasi ini di bedakan menjadi dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.. dana alokasi umum yang dibagikan daerah berasal dari APBN dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan nilai minimumnya 25% dari anggaran rutin dalam APBN. Dana ini dialokasikan 10% untuk propinsi dan 90% untuk kabupaten/kota.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus juga berasal dari APBN dan dialokasikan ke kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung pada tersedianya dana dari APBN. Yang dimaksud

kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dan/atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Sebagai contoh dari kebutuhan khusus ini adalah kebutuhan di kawasan transmigrasi yang tidak sama dengan kebutuhan di daerah lain, pembangunan jalan di kawasan terpencil, pembangunan selain saluran irigasi primer, dan saluran drainase primer.

Kebutuhan yang diprioritaskan nasional contohnya adalah proyek kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar juga proyek-proyek yang dibiayai oleh donor baik nasional maupun internasional. Disamping itu jenis dana lain seperti dana reboisasi yang dibagi dengan perimbangan 60% untuk pemerintah pusat dan 40% untuk pemerintah daerah penghasil dana reboisasi dan penghijauan di daerah. Ditegaskan pula bahwa untuk dana alokasi khusus ini harus ada dana pendamping yang berasal dari APBD guna menyatakan komitmen dan tanggung jawab dari pemerintah daerah yang bersangkutan (Mardiasmo, 2002:144).

4.3.3 Pinjaman Daerah

Undang-undang No. 32 tahun 2004 pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam atau sumber luar negeri dengan persetujuan pemerintah pusat untuk membiayai sebagian anggarannya. Pinjaman dalam negeri dapat bersumber dari pemerintah pusat dan/atau

lembaga komersial, atau melalui penerbitan obligasi daerah. Peminjaman luar negeri di mungkinkan dilakukan daerah, namun mekanismenya harus melalui pemerintah pusat.

Ketentuan mengenai pinjaman daerah selanjutnya dinyatakan dalam UU No.33 Tahun 2004 Bab VIII . Adanya pinjaman daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan merupakan upaya pemerintah daerah untuk menunjukkan kemampuan dan mendewasakan sistem perencanaan anggaran daerah secara lebih mantap dan mandiri (strategi investasi). Pemerintah daerah menentukan skala prioritas program yang layak dibiayai oleh dana pinjaman yaitu program pengembangan infrastruktur sosial, infrastruktur ekonomi, dan infrastruktur khusus.

Berdasarkan tujuan penggunaannya pinjaman daerah dikategorikan menjadi (Davey, K.J, 1988:154):

1. Untuk menutup kebutuhan dana (cash) jangka pendek
2. Untuk membiayai kekurangan dana anggaran tahunan berupa biaya rutin dan beban hutang
3. Untuk membeli pabrik dan peralatan dengan unsur jangka menengah
4. Untuk membiayai investasi yang diharapkan dapat menghasilkan penerimaan daerah.
5. Untuk membiayai pembangunan modal jangka panjang.

Pemerintah daerah senantiasa ingin mendapatkan pinjaman daerah dengan syarat yang lunak dan tidak memberatkan di saat jatuh tempo membayar asuransi pinjaman. Namun demikian pinjaman daerah dapat

menimbulkan pengaruh terhadap keuangan pemerintah daerah. Beberapa efek utama yang muncul dan adanya pinjaman pemerintah adalah:

1. Pemerintah punya kelebihan dana untuk pengeluaran berjalan atau investasi modal.
2. Kekurangan dana yang diperlukan oleh pemerintah untuk investasi dapat dilakukan oleh sektor swasta (*private sector*).
3. Bertambahnya pinjaman membutuhkan akan pajak yang lebih tinggi.
4. Keadaan neraca pembayaran akan tertekan (*distorted*) jika pinjaman bersumber dari luar negeri..

Memungkinkan timbulnya inflasi sebagai akibat meningkatnya pengeluaran pemerintah.

4.4 Pentingnya Anggaran Keuangan Daerah

Anggaran Keuangan Daerah penting karena beberapa alasan (Mardiasmo, 2002 :121), yaitu :

1. Anggaran merupakan alat penting bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang

ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choice*), dan *trade offs*.

3. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

Anggaran Keuangan Daerah mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu ; (1) sebagai alat perencanaan, (2) alat Pengendalian, (3) alat kebijakan fiskal (4) alat politik (5) alat koordinasi dan Komunikasi, (6) alat penilai kinerja, dan (7) alat motivasi.

4.4.1 Anggaran Sebagai Alat Perencanaan (*Planning Tool*)

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran Keuangan Daerah dibuat untuk merencanakan tindakan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.

Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk :

1. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan;
2. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya;

3. Mengalokasi dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun; dan
4. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

4.4.2 Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (*Control Tool*)

Anggaran merupakan suatu alat yang esensial untuk menghubungkan antara proses perencanaan dan proses pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebih jika dikatakan presiden, menteri, gubernur, bupati, dan manajer publik lainnya yang dapat dikendalikan melalui anggaran. Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan (membatasi kekuasaan) eksekutif.

Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya *overspending* (pengeluaran yang berlebihan), *underspending* (kekurangan dana untuk pengeluaran) dan salah sasaran (*misappropriation*) dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Anggaran merupakan alat monitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah. Sebagai alat pengendalian manajerial, anggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu anggaran digunakan untuk memberi

informasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efisien, tanpa ada korupsi dan pemborosan.

4.4.3 Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (*Fiscal Tool*)

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arahan kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4.4.4 Anggaran Sebagai Alat Politik (*Political Tool*)

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan alat politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, pembuatan anggaran publik membutuhkan *political skill*, *coalition building*, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik para manajer publik. Manajer publik harus sadar sepenuhnya bahwa kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui dapat menjatuhkan kepemimpinannya, atau paling tidak menurunkan kredibilitas pemerintah.

4.4.5 Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (*Coordination and Communication Tool*)

Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

4.4.6 Anggaran Sebagai Alat Penilai Kinerja (*Performance Measurement Tool*)

Anggaran merupakan wujud komitmen dari *budget holder* (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisien pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

4.4.7 Anggaran Sebagai Alat Motivasi (*Motivation Tool*)

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar kinerja bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat *challenging but attainable* atau *demanding but achievable*. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.

4.5 Kapasitas dan Kebutuhan Fiskal Daerah dalam Otonomi Daerah

Dengan diimplementasikannya otonomi Daerah sejak tanggal 1 Januari 2001, maka kepada Daerah telah diberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di Daerah. Berdasarkan UU No 25/ 1999 untuk mendukung pelaksanaan otonomi Daerah tersebut, kepada Daerah diberikan:

- a. Kewenangan untuk mendayagunakan potensi keuangan Daerah sendiri; dan
- b. Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dan antar-Daerah.

Kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah harus dalam batas-batas kewajaran, dengan koridor yang diatur melalui UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta revisinya, UU Nomor 34 Tahun 2000.

Pelaksanaan perimbangan keuangan dilakukan melalui Dana

Perimbangan yang mempunyai tujuan utama untuk mengatasi ketimpangan keuangan yang terjadi baik antara Pusat dan Daerah maupun antar Daerah.

Sesuai dengan tujuannya maka Dana Perimbangan dibedakan menjadi :

- a. Bagi Hasil untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan (nasional) dan penerimaan sumber daya alam.
- b. DAU merupakan transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah.
- c. DAK merupakan transfer yang bersifat khusus (*specific grant*) untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan khusus Daerah dan/atau kepentingan Nasional.

Jumlah DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari Penerimaan Dalam Negeri (PDN) di APBN pada tahun yang sama. Ini merupakan jumlah yang sangat signifikan, terutama karena DAU memang dimaksudkan untuk mengurangi ketidakmerataan/ketimpangan antar Daerah yang cenderung diperparah oleh bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam. Untuk itu, besarnya DAU bagi masing-masing daerah dihitung dengan formula tertentu, yang pada pokoknya didasarkan pada perkiraan kebutuhan daerah dan potensi ekonomi daerah yang bersangkutan

Dalam UU 25/1999, DAU ditetapkan berdasarkan rumus:

$$\left(\begin{array}{c} \text{Jumlah Dana} \\ \text{Alokasi} \\ \text{Umum untuk} \\ \text{Daerah} \end{array} \right) = \frac{\text{(Bobot Daerah yang bersangkutan)}}{\text{(Jumlah bobot dari seluruh Daerah)}}$$

Bobot Daerah ditetapkan berdasarkan:

- a. Kebutuhan wilayah otonomi Daerah: paling sedikit dicerminkan dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografis, dan tingkat pendapatan dengan memperhatikan kelompok masyarakat miskin.
- b. Potensi ekonomi (Kapasitas Fiskal) Daerah: antara lain dapat dicerminkan dengan potensi penerimaan yang diterima Daerah seperti potensi industri, potensi SDA, potensi SDM, dan PDRB.

Berdasarkan rumus di atas dapat dilihat bahwa penentuan bobot Daerah sangat krusial dalam pelaksanaan penghitungan DAU.

Konsep dasar formulasi DAU sebagaimana yang diamanatkan dalam UU 25/1999 tersebut di atas, secara implisit merupakan penjabaran dari teori governmental transfer yang berbasis pada konsepsi *fiscal gap*. Dengan konsepsi teori *fiscal gap*, maka kesenjangan fiskal yang merupakan selisih negatif antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal dianggap sebagai kebutuhan yang harus ditutup melalui *transfer* pemerintah.

Ide dasarnya adalah bahwa untuk daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal relatif besar dibandingkan kebutuhan fiskalnya, maka DAU yang dialokasikan seyogyanya tidak terlalu besar. Sebaliknya, daerah-daerah yang memiliki kebutuhan fiskal relatif tinggi terhadap kapasitas fiskalnya,

membutuhkan DAU yang relatif besar pula agar mereka dapat menyediakan pelayanan dasar yang cukup baik.

Karena “fungsinya” adalah sebagai alat untuk mengurangi ketimpangan fiskal horizontal, maka DAU harus dilihat secara keseluruhan sebagai bagian Dana Perimbangan. DAU tidak boleh dilihat secara terpisah dengan (terutama) bagi hasil pajak (PBB, BPHTB, PPh perorangan) dan bagi hasil sumber daya alam, karena DAU memiliki fungsi untuk menetralisasi dampak yang diakibatkan oleh bagi hasil tersebut. Dengan demikian DAU bisa dianggap sebagai *equalization grant*.

Konsep dasar formula DAU yang mendasarkan pada pendekatan fiscal gap secara umum dijabarkan dengan persamaan:

Kebutuhan DAU Daerah = Kebutuhan Daerah – Potensi penerimaan Daerah

Secara umum usulan formulasi DAU 2002 mengedepankan beberapa kriteria utama, yaitu:

- a. mudah dimengerti oleh publik;
- b. dapat dipertanggungjawabkan secara akademis;
- c. menggunakan pendekatan fiscal gap;
- d. tidak menggunakan pendekatan kasus per kasus;
- e. formula DAU untuk Propinsi tidak harus sama dengan formula DAU untuk Kabupaten/Kota;
- f. Daerah dapat/mampu menghitung sendiri.

Dengan menggunakan pendekatan fiscal gap, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka “Kebutuhan DAU suatu Daerah (Keb DAU)”

adalah “Kebutuhan Fiskal Daerah (KF)” dikurangi “Potensi Fiskal Daerah (PF)”. Persamaan tersebut dapat dituliskan sbb:

$$\text{Keb DAU}_i = \text{KF}_i - \text{PF}_i$$

1. Kebutuhan Fiskal (KF)

Untuk menentukan berapa besarnya kebutuhan fiskal suatu Daerah bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Secara ideal, “Kebutuhan Fiskal suatu Daerah” seharusnya dihitung berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk masing-masing Daerah dan Standar Analisa Belanja (SAB) atau Standard Spending Assesment (SSA), sehingga ukuran kebutuhan Daerah tersebut bersifat riil dan mengarah kepada penggunaan dana yang efisien. Namun demikian, sampai saat ini SPM dan SAB/SSA belum dikembangkan dengan baik di Indonesia, sehingga pengukuran kebutuhan dengan menggunakan pendekatan ini belum dapat dilakukan.

Oleh karena ukuran ideal KF tersebut belum ada, maka dalam formulasi DAU 2002, KF tidak diukur sebagai ukuran riil namun merupakan proxi kebutuhan Daerah yang didasarkan pada variabel-variabel non fiskal. Variabel-variabel yang dipilih dalam pengukuran KF ini tidak terlepas dari amanat UU 25/1999, yaitu:

- a. Variabel jumlah penduduk;
- b. Variabel luas wilayah;
- c. Variabel keadaan geografi à didekati dengan Harga Bangunan; dan
- d. Variabel kemiskinan à didekati dengan *Poverty Gap*

Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pemilihan variabel-variabel tersebut adalah:

- a. Tidak menyimpang dari amanat UU 25/1999;
- b. Variabel tersebut dapat didukung oleh ketersediaan data secara nasional;
- c. Data yang tersedia sebagai penjabaran variabel tersebut bersifat netral dan dapat dipercaya.

Untuk variabel jumlah penduduk digunakan data jumlah penduduk hasil sensus tahun 2000 yang dilakukan oleh BPS sementara untuk luas wilayah menggunakan data luas wilayah administratif – daratan yang diambil dari Kepmendagri, UU Pembentukan Daerah, dan BPS (Pusat maupun Daerah). Alasan menggunakan “Harga Bahan pokok” sebagai proxi dari keadaan geografi adalah bahwa pada dasarnya perbedaan letak geografis suatu Daerah berdampak secara langsung terhadap tingkat harga di Daerah tersebut. Semakin tinggi tingkat kesulitan geografis suatu Daerah (misalnya Daerah bergunung-gunung, dipisahkan lautan/kepulauan, bersungai-sungai, dsb), maka semakin tinggi pula tingkat harga di Daerah tersebut. Sementara, alasan penggunaan Poverty gap sebagai proxi dari variabel kemiskinan adalah bahwa makin banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, makin besar kebutuhan pembiayaan suatu daerah. Poverty Gap diukur dalam persentase, adalah jarak rata-rata pendapatan penduduk dari garis kemiskinan. Orang tidak lagi dikatakan miskin jika jarak rata-ratanya nol. Poverty gap ini adalah ukuran defisit kemiskinan dari seluruh penduduk yang menunjukkan

jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengangkat seluruh orang miskin keluar dari kemiskinan melalui transfer dana.

Berbagai variabel tersebut di atas (Penduduk, Luas Wilayah, Harga Bahan pokok, dan Poverty Gap) digunakan sebagai alat untuk memproxikan besarnya kebutuhan Daerah dengan mencari “proporsi” dari masing-masing variabel pada setiap Daerah. Metode proporsi ini digunakan dengan tujuan untuk mencari “posisi relatif” dari masing-masing variabel di setiap Daerah, sehingga akan menunjukkan variasi antar Daerah. Penghitungan dengan metode proporsi ini dilakukan dengan meng-“index” setiap data dari masing-masing variabel di setiap Daerah terhadap rata-rata data nasional.

Permasalahan selanjutnya adalah bagaimana menentukan bobot dari masing-masing variabel. Untuk DAU tahun 2001, bobot masing-masing variabel ditetapkan sama yaitu 25%. Sementara untuk DAU 2002, bobot variabel ditetapkan berdasarkan pertimbangan rasional dan analisa ekonometrik regresi untuk menentukan arah perubahan bobot. Harus diakui bahwa pertimbangan subyektif lebih mendominasi penetapan bobot variabel ini, namun demikian pertimbangan tersebut tetap bersifat rasional, logis, dan didasarkan pula pada kajian empirik atas hasil simulasi.

Dasar pertimbangan penetapan bobot adalah bahwa pada dasarnya keempat variabel tersebut di atas dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori variabel, yaitu variabel kependudukan (Jumlah penduduk dan Kemiskinan Relatif) dan variabel kewilayahan (luas wilayah dan harga bangunan). Salah satu reasoning pengelompokkan variabel tersebut adalah bahwa berdasarkan

pengalaman selalu terjadi dikotomi antara Jawa dan Luar Jawa, dimana Jawa selalu menang di faktor penduduk sementara luar Jawa selalu menang di faktor wilayah. Oleh karena itu bobot untuk kedua kategori tersebut ditetapkan sama yaitu masing-masing 50%.

Selanjutnya bobot dari masing-masing kategori dibagi lagi sehingga rinciannya adalah:

- a. IP = 40% } 50%
- b. IKR = 10%
- c. IW = 10% } 50%
- d. IHB = 40%

Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya bahwa yang dicari di sini (KF) adalah ukuran “fiskal” untuk kebutuhan Daerah. Penjelasan mengenai jenis variabel, ukuran index variabel, dan bobot variabel tersebut di atas masih hanya menjelaskan proporsi atau posisi relatif ukuran kebutuhan masing-masing Daerah. Langkah terakhir yang harus dilakukan adalah mengalikan antara index kebutuhan masing-masing Daerah dengan proxi ukuran biaya per unit pelayanan umum, yaitu rata-rata biaya rutin gaji dan non gaji serta biaya pembangunan (TPR).

$$TPR = \frac{\text{Belanja Gaji} + \text{Rutin Non Gaji} + \text{Belanja Pembangunan}}{\text{Jumlah Daerah}}$$

Secara ringkas persamaan untuk perhitungan Kebutuhan Fiskal (KF) adalah:

$$KF = TPR \times \{(0,4 \times IP) + (0,1 \times IKR) + (0,1 \times IW) + (0,4 \times IHB)\}$$

2. Kapasitas Fiskal (PF)

Kapasitas Fiskal dalam UU No 25 Tahun 99 tentang Otonomi daerah

Kapasitas Fiskal disebut Potensi Fiskal. Untuk mengukur potensi fiskal relatif lebih mudah karena data potensi penerimaan Daerah telah tersedia dengan cukup baik. Variabel fiskal yang dipakai untuk menghitung PF adalah sumber penerimaan Daerah yang penggunaannya tidak terikat (penerimaan umum APBD di luar DAU), yaitu PAD, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA).

Untuk bagi hasil pajak (PBB, BPHTB, dan PPh) dan bagi hasil dari penerimaan SDA digunakan data aktual penerimaan bagi hasil tersebut. Khusus untuk bagi hasil SDA yang dipergunakan hanya “75%” dari total penerimaan Daerahnya, ini dimaksudkan untuk mengakomodasi adanya kekhawatiran daerah terhadap ketidakpastian jumlah yang akan diterima karena perhitungan bagi hasil SDA berdasarkan jumlah yang disetorkan ke pusat. Selain itu kebijakan ini untuk memberikan insentif ke daerah sebagai biaya untuk perbaikan lingkungan dan sosial cost akibat dampak dari eksploitasi SDA.

Untuk PAD tidak digunakan data PAD aktual namun menggunakan “potensi PAD” yang diestimasi dari regresi linear antara PAD aktual dengan PDRB sektor jasa. Pertimbangan PDRB Jasa digunakan untuk memperkirakan potensi PAD adalah bahwa sumber utama Pajak Daerah dan Retribusi sebagian besar berbasis pada sektor jasa seperti hotel, restoran, periklanan, dsb.

Sedangkan pertimbangan penggunaan “Potensi PAD” dan bukan PAD

aktual adalah:

- a. PAD adalah faktor pengurang dalam perhitungan DAU;
- b. Apabila digunakan PAD aktual, maka akan mendorong Daerah untuk semakin memperkecil PAD-nya, dengan motivasi untuk mendapatkan DAU yang lebih besar;
- c. Apabila digunakan potensi PAD (PAD estimated) justru akan mendorong Daerah untuk dapat mengoptimalkan PAD-nya secara rasional. Hal ini karena apabila capaian PAD aktual Daerah ternyata lebih dari estimasi dalam perhitungan DAU, maka secara tidak langsung sebenarnya Daerah tersebut telah diuntungkan. Sedangkan apabila capaian PAD-nya lebih rendah dari estimasi dalam perhitungan DAU maka Daerah tersebut merugi karena nilai pengurang DAU-nya lebih besar dari yang seharusnya.

Secara matematis notasi persamaannya adalah sebagai berikut:

$$PAD\ Estimated\ (\hat{PAD}) = b_1 + b_2\ PDRB_{jasa}$$

Apabila dikaitkan dengan amanat UU 25/1999 tentang variabel yang harus dicerminkan dalam formula DAU, maka seluruh variabel tersebut telah terwakili, yaitu:

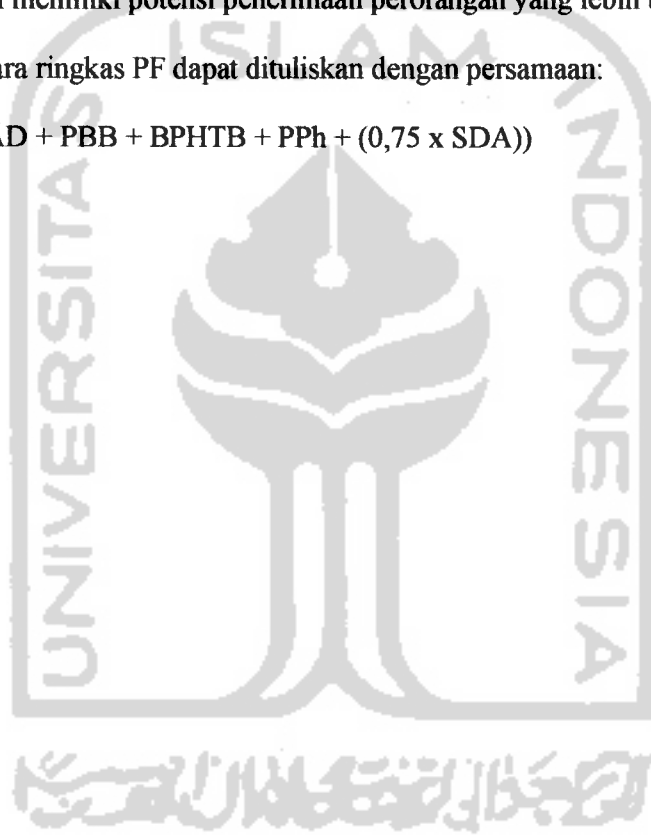
- a. Potensi industri dicerminkan dari penerimaan PBB dan BPHTB, karena pada dasarnya semakin penerimaan PBB dan BPHTB di suatu Daerah berbanding lurus dengan tingkat industri di Daerah tersebut. Apabila

suatu lahan telah digunakan untuk kebutuhan industri maka biasanya nilainya naik sehingga penerimaan dari PBB dan BPHTB-pun akan naik.

- b. Potensi SDA dicerminkan dari penerimaan bagi hasil sumber daya alam.
- c. Potensi SDM dicerminkan dari penerimaan bagi hasil PPh perorangan, karena pada dasarnya daerah yang memiliki potensi SDM yang lebih baik akan memiliki potensi penerimaan perorangan yang lebih baik pula.

Secara ringkas PF dapat dituliskan dengan persamaan:

$$PF = P\hat{A}D + PBB + BPHTB + PPh + (0,75 \times SDA))$$



BAB V

METODE PENELITIAN

5.1 Data yang diperlukan

Data yang diperlukan dapat berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kantor Badan Pusat Statistik (BPS) dan RAPBD Kota Yogyakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Anggaran dan Penerimaan Belanja Daerah (APBD) tahun 1999-2000 (sebelum otonomi), dan
2. Data Anggaran dan Penerimaan Belanja Daerah (APBD) tahun 2001-2004 (setelah otonomi) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik,

Juga penelitian ini didukung data dari :

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta yang diambil dari data APBD
3. Profil Kota Yogyakarta,
4. Dan Lain-lain

5.2 Metode Analisis Data

Penelitian ini digunakan data sekunder dalam bentuk laporan dari berbagai instansi terkait tahun 1999-2004.

5.2.1 Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah alat untuk membahas dan menerangkan hasil penelitian tentang berbagai gejala atau kasus berupa uraian secara sistematis. Analisis ini digunakan sebagai interpretasi hasil perhitungan dari analisis kuantitatif.

5.2.2 Analisis Kuantitatif

Analisis Kuantitatif adalah yang menggunakan data-data berupa angka-angka perhitungan. Analisis ini dapat diperoleh dengan menggunakan metode yang dipergunakan penulis.

5.3 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini menggunakan variabel-variabel sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Suatu sumber pendapatan yang diperoleh suatu daerah dari hasil-hasil pendapatan yang sah sebagai mana UU No. 33 tahun 2004:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud padapasal 6 ayat (1) huruf d yang meliputi :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

2. Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak (BPHBP)

Sesuatu yang diperoleh suatu daerah yang berasal dari pajak dan sumber daya alam yang diukur dengan nilai satuan milyar rupiah.

3. Sumbangan Daerah (B)

Sumber pendapatan yang diperoleh dari pemerintah atau pihak swasta untuk membiayai sebagian anggaran dengan persetujuan pemerintah pusat yang diukur dengan satuan milyar rupiah.

4. Pengeluaran rutin

Bagian belanja yang berupa ; Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasional dan peeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan hasil, manfaat, dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat yang diukur dengan satuan milyar rupiah.

5. Pengeluaran Pembangunan

Bagian belanja pembangunan berbagai sektor yang diukur dengan satuan milyar rupiah.

6. Penerimaan Daerah

Sumber pendapatan yang diperoleh untuk membiayai sebagian anggaran secara keseluruhan bersumber dari pendapatan-pendapatan yang sah diukur dengan satuan milyar rupiah.

5.4 Alat Analisis Data

Data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, dan kapasitas fiskal, yaitu untuk mengetahui kemampuan daerah dalam pembiayaan anggaran rutin dan pembangunan. Dengan rumus sebagai berikut :

5.4.1 Derajat Desentralisasi Fiskal

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah diberlakukan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah di berlakukan, perlu dilakukan langkah-langkah dalam mengantisipasi pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Alat analisis Derajat desentralisasi fiskal dengan melihat estimasi penerimaan PAD, BHPBP, dan Sumbangan daerah.

Derajat desentralisasi fiskal dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Abdul Halim, 2004:335)

$$DF \text{ PAD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$$

$$DF \text{ BHPBP} = \frac{\text{Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak (BHPBP)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$$

$$DF \text{ SB} = \frac{\text{Sumbangan dan Bantuan (B)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100 \%$$

Total penerimaan daerah (TPD) terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak (BHPBP) dan Sumbangan dan Bantuan (B), sehingga $DF \text{ PAD} + DF \text{ BHPBP} + DF \text{ B} = 100\%$. Semakin tinggi DF PAD menunjukkan semakin besar peranan PAD terhadap struktur penerimaan APBD Kota Yogyakarta.

5.4.2 Kebutuhan Fiskal (*fiscal need*)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Bab VI pasal 28 bahwa :

1. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan layanan dasar umum.
2. Setiap kebutuhan fiskal pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur secara berturut turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, indeks Kemahalan Kontruksi, Produk Domestik Regional Bruto per Kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia.

Untuk menghitung kebutuhan fiskal kota Yogyakarta dibandingkan dengan Kabupaten lain di Propinsi DIY menggunakan

empat kriteria, meliputi : (1) luas wilayah, (2) jumlah penduduk; (3) tingkat kemiskinan; (4) Indeks harga;

1. Luas wilayah adalah luas wilayah Kabupaten i. Semakin besar wilayah mencerminkan cakupan area yang menjadi tanggung jawab pelayanan publik pemerintah daerah. Semakin besar wilayah maka semakin besar kebutuhan fiskal yang dibutuhkan.
2. Jumlah penduduk Kabupaten i. Semakin besar jumlah penduduk maka semakin besar kebutuhan fiskal yang dibutuhkan.
3. Tingkat kemiskinan diukur dari jumlah keluarga pra sejahtera di Kabupaten i. Tingginya jumlah keluarga miskin menuntut peran fiskal pemerintah yang lebih besar
4. Indeks harga yang diukur dari rata-rata harga makanan pokok (beras) untuk Kabupaten i. Variabel ini merupakan proksi dari kondisi geografis daerah yang berimplikasi dari tingkat kemahalan suatu daerah.

Untuk menghitung kebutuhan fiskal di kota Yogyakarta digunakan formula sebagai berikut (Hamid,Edy Suandi 2005:48)

$$F_{Ni} = \overline{Png}x(\alpha_1P_i + \alpha_2W_i + \alpha_3K_i + \alpha_4K_{mi})$$

Dimana:

$$\overline{Png} = \frac{\sum_{j=1}^n Png_j}{n}$$

\overline{Png} = pengeluaran daerah rata-rata seluruh daerah

α = merupakan bobot masing-masing variabel yang dihitung dari persamaan ekonometrika.

5.4.3 Kapasitas Fiskal (*fiscal capacity*)

Untuk menghitung kapasitas fiskal di kota Yogyakarta menggunakan tiga kriteria, meliputi : (1) Bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA), (2) Potensi Sumber Daya Manusia ; dan (3) Potensi Industri.

1. Bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA) (S_i). Variabel ini mencerminkan besarnya sumberdaya alam yang dimiliki tiap Kabupaten diukur dari proporsi PDRB sektor pertanian dan tambang galian di Kabupaten i .
2. Potensi Sumber Daya Manusia (IPMi). Variabel ini mencerminkan potensi sumberdaya manusia yang dimiliki tiap Kabupaten diukur dari proporsi indeks sumber daya manusia di Kabupaten i .
3. Potensi hasil Sumber Daya Industri (Y_i). Variabel ini mencerminkan besarnya sumberdaya Industri yang dimiliki tiap Kabupaten diukur dari proporsi PDRB sektor industri di Kabupaten i .

Untuk menghitung kapasitas fiskal di kota Yogyakarta digunakan formula sebagai berikut,

(Hamid,Edy Suandi 2005:50)

$$FC_i = (0,75S_i + IPM_i + Y_i)PAD_i$$

BAB VI

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

6.1 Derajat Desentralisasi Fiskal

Data yang digunakan di sini adalah data sekunder yaitu data Rencana Anggaran dan Realiasi Pemerintah Kota Yogyakarta. Adapun periode data yang digunakan adalah tahun 1999-2004. Derajat desentralisasi fiskal sebagaimana diuraikan pada Bab IV, untuk mengukur derajat desentralisasi fiskal dapat menggunakan beberapa indikator atau rasio. Namun demikian pada pembahasan ini indikator atau ratio yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Rasio PAD dengan Total Pendapatan Daerah (TPD)
- b. Rasio Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak (BPHBP) dengan total penerimaan daerah (TPD)
- c. Rasio bantuan atau subsidi (B) dengan total penerimaan daerah (TPD)

Data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Total Pendapatan Daerah (TPD), pajak pusat untuk daerah (PPD) dan Bantuan atau subsidi (B) Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 1999-2004 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6.1 Data PAD, BPHBP, dan B Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 1999-2004

Tahun	PAD (Rp)	BPHBP (Rp)	B (Rp)	TPD (Rp)
1998/1999	24,790,128	10,574,498	55,097,233	97,505,253
1999/2000	22,452,952	12,290,938	48,257,959	104,476,182
2001	40,352,593	33,118,034	134,151,472	227,099,170
2002	56,377,460	25,094,252	162,874,512	303,020,071
2003	68,621,564	32,300,731	217,432,000	406,865,436
2004	68,618,333	49,361,901	203,287,000	339,307,534

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 1999-2004

Hasil perhitungan derajat desentralisasi fiskal selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6.2 DF PAD, DF BPHBP, dan DF B tahun 1999-2004

Tahun	DF PAD	DF BPHBP	DF B
1998/1999	0.25	0.11	0.57
1999/2000	0.21	0.12	0.46
Rata-rata sebelum otonomi	0.23	0.12	0.52
2001	0.18	0.15	0.59
2002	0.19	0.08	0.54
2003	0.17	0.08	0.53
2004	0.20	0.15	0.60
Rata-rata setelah otonomi	0.19	0.12	0.57

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 1999-2004 (diolah)

Berdasarkan tabel 6.2 diatas dapat diketahui bahwa porsi pendapatan Asli daerah terhadap penerimaan daerah hanya sebanyak 17 sampai dengan 21%. Hal ini berarti hanya sebagian kecil dari anggaran daerah yang dibiayai oleh sumber-sumber berasal dari daerah. Kondisi porsi penerimaan asli daerah dari total pendapatan daerah tahun 1999-2004 menunjukkan adanya kecenderungan penurunan.

Ketergantungan pada pusat dapat dilihat dari rasio bantuan atau subsidi (B) dengan total penerimaan daerah (TPD). Besarnya rasio bantuan atau subsidi (B) dengan total penerimaan daerah (TPD) adalah antara 46% sampai dengan 59%. Hal ini menunjukkan proporsi Sumbangan dan Bantuan pemerintah pusat terhadap total Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) terdapat proporsi antara 46% sampai dengan 59%. Hal ini mencerminkan masih banyak keuangan yang diperlukan untuk pembiayaan yang perlu dibantu dan di subsidi dari pemerintah pusat. Ini berarti bahwa

pembiayaan belanja pembangunan masih sangat tergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat.

Data anggaran sebelum otonomi (tahun 1990-2000) menunjukkan bahwa struktur penerimaan pemerintah daerah didominasi oleh transfer pemerintah pusat (bantuan dan sumbangan). Pada periode setelah otonomi, porsi ini meningkat mencapai hampir 57 persen dari total penerimaan daerah.

Hasil diatas menunjukkan relatif kecilnya peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain, peranan/kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan, mendominasi konfigurasi APBD. Seperti juga banyak dialami kota-kota lain di Indonesia, ketergantungan ini disebabkan sumber-sumber penerimaan yang relatif besar pada umumnya dikelola oleh pusat, sedangkan sumber-sumber penerimaan yang relatif kecil dikelola oleh Daerah. Pola hubungan seperti ini membuat pemerintah daerah sangat tergantung pada pusat.

Dilihat dari rasio Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak (BPHBP) dengan total penerimaan daerah (TPD) pada periode setelah otonomi tahun 2001 tidak menunjukkan adanya perubahan. Hal ini disebabkan kota Yogyakarta tidak dapat sepenuhnya tidak bergantung dari pusat sehingga masih memerlukan subsidi.

Dengan berlakunya UU No 25 tahun 1999 mengakibatkan ada beberapa jenis pajak dan retribusi daerah potensial yang hilang. Untuk

mengkompensasi berkurangnya PAD, pemerintah daerah mendapatkan sumber penerimaan baru, yakni PBBM-KB, dengan tarifnya 5 persen dari harga jual dikurangi PPN. Penerimaannya dibagikan antara propinsi (5 persen), kabupaten/kota penghasil (45 persen) dan kabupaten/kota lainnya (45 persen).

Sementara pemerintah kota Yogyakarta hanya boleh memungut enam jenis pajak, yakni pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan/pengelolaan bahan galian golongan C, pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Dalam hal retribusi, pemerintah kota Yogyakarta memungut hanya 10 jenis retribusi jasa umum, 13 jenis retribusi jasa usaha dan enam jenis retribusi kewenangan tertentu. Sumber terbesar dari kehilangan pendapatan daerah berasal dari pos-pos retribusi, yakni bahan galian golongan C, pemanfaatan air bawah tanah (ABT) dan air permukaan dan BBN-KB.

Penerimaan pemerintah propinsi terhadap pemerintah kota/kabupaten di Yogyakarta yang hilang yang terbesar ada dua, yaitu bahan galian golongan C dan pemakaian air bawah tanah. Namun demikian, kehilangan jenis-jenis pungutan sebenarnya bukan kerugian bagi propinsi jika dilihat secara kesatuan, karena jenis-jenis retribusi itu hanya 'pindah' ke kabupaten/kota, sehingga menaikkan PAD kabupaten/kota.

Hasil wawancara lapangan dengan beberapa personal Pemda menemukan bahwa sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah selama ini masih banyak yang terpusat. Sehingga dalam pemungutannya, pemda tidak

mengetahui berapa besar sebenarnya sumber atau potensi pajak/retribusi yang dapat/harus dibayarkan. Mereka juga tidak mengetahui cara menariknya, dan rumus penetapan besarnya pajak/retribusi yang harus dibayar. Sebagai contoh, pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) pada awalnya dianggap sebagai tambahan komponen pajak DT I (propinsi), sehingga di DT II merupakan bagi hasil. Namun, jika diberlakukan sebagai pajak DT I, ada kejanggalan, karena pajak tersebut diatur oleh pemerintah Pusat, sehingga pemda tidak mengetahui jumlah maupun waktunya kapan diberikan.

Tabel 6.3 Pertumbuhan Rasio PAD, dan B terhadap TPD tahun 1999-2004

Tahun	PAD/TPD	Pertumbuhan (%)	B/TPD	Pertumbuhan (%)
1999	0.25		0.57	
2000	0.21	-16.00%	0.46	-19.30%
2001	0.18	-14.29%	0.59	28.26%
2002	0.19	5.56%	0.54	-8.47%
2003	0.17	-10.53%	0.53	-1.85%
2004	0.20	17.65%	0.60	13.21%
	Rata-rata	-3.52%	Rata-rata	2.37%

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 1999-2004 (diolah)

Rata-rata pertumbuhan rasio PAD/TPD adalah -3.52% (negatif), sedangkan Rata-rata pertumbuhan rasio B/TPD adalah 2.37% (positif), menunjukkan setelah otonomi APBD kota Yogyakarta semakin tergantung pada pusat. Kondisi penerimaan daerah tahun 2000-2004 menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap pemerintah pusat tidak menggambarkan data secara signifikan terhadap penurunan, namun jika dikaji lebih lanjut ketergantungan ini masih disebabkan adanya krisis yang masih terasa. Perubahan struktur

anggaran bidang ekonomi, subsidi pembangunan kepada daerah bawahan, serta angsuran Pinjaman/Hutang dan bunga dari total APBD.

Era desentralisasi fiskal memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Daerah untuk membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri. Peluang seperti ini tidak pernah ada sebelum otonomi, yang terjadi sebaliknya yaitu ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan Pemerintah Pusat sebagai wujud ketidakberdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai Belanja Daerah.

6.2 Kebutuhan Fiskal

Analisis Kebutuhan Fiskal adalah untuk membandingkan kebutuhan fiskal keuangan daerah kota Yogyakarta dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Propinsi DIY. Data luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan; dan Indeks harga bahan pokok di 5 Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dalam lampiran 1. Berdasarkan data pada lampiran 1 dapat dihitung bobot luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan; dan Indeks harga di 5 Kabupaten kota Yogyakarta seperti pada lampiran 2. Kebutuhan fiskal selanjutnya dapat dihitung dengan mengalikan bobot variabel dengan pengeluaran rata-rata seluruh Kabupaten. Perbandingan kebutuhan fiskal keuangan daerah kota Yogyakarta dengan rata-rata pengeluaran Kabupaten/Kota lain di Propinsi DIY adalah sebagai berikut:

Tabel 6.4. Perbandingan Kebutuhan Fiskal Kota Yogyakarta dengan Rata-Rata Kebutuhan Fiskal Kabupaten/Kota Di Propinsi DIY

Tahun	Kebutuhan Fiskal Kota Yogyakarta	Rata-rata Kebutuhan Fiskal Kabupaten/kota DIY	Persen
1999	Rp 67,903,735,488.67	Rp 119,441,692,257.72	56.85%
2000	Rp 90,466,322,765.06	Rp 123,135,765,214.14	73.47%
2001	Rp 68,115,515,095.03	Rp 131,939,092,729.93	51.63%
2002	Rp 109,177,997,846.19	Rp 144,523,614,580.64	75.54%
2003	Rp 136,295,404,748.39	Rp 214,563,041,181.80	63.52%
2004	Rp 122,338,730,999.92	Rp 288,094,069,187.65	42.46%
		Rata-rata	60,6%

Sumber : Lampiran 3

Berdasarkan tabel 6.4 diatas dapat diketahui bahwa rata-rata kebutuhan fiskal Kota Yogyakarta adalah lebih rendah (0,6 x) dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran Kabupaten/Kota di Propinsi DIY. Kebutuhan fiskal kota yogyakarta adalah lebih rendah dari rata-rata kebutuhan fiskal kabupaten lain di Yogyakarta karena luas wilayah, jumlah penduduk lebih rendah dari kabupaten lain di Yogyakarta.

Luas wilayah Kota Yogyakarta hanya sebesar 1% dari total wilayah kabupaten kota di DIY. Luas wilayah Kota Yogyakarta adalah 32.5 Ha, sedangkan luas total wilayah kabupaten/kota di DIY adalah 2.716 Ha. Jumlah penduduk kota Yogyakarta rata-rata tahun 1999-2004 adalah sebesar 17% dari jumlah total wilayah kabupaten/kota di DIY. Jumlah penduduk kota Yogyakarta tahun 2004 adalah sebesar 516.641 jiwa sedangkan jumlah kabupaten/kota di DIY tahun 2004 adalah sebesar 3.170.767 jiwa.

Indeks Kemiskinan Kota Yogyakarta lebih rendah dibandingkan dengan indeks kemiskinan kabupaten/kota lain di DIY tetapi biaya hidup yang diukur dari Indeks Harga lebih tinggi dibandingkan dengan biaya hidup

kabupaten/kota lain di DIY. Indeks Kemiskinan Kota Yogyakarta adalah 2,64, sedangkan rata-rata Indeks Kemiskinan kabupaten/kota di DIY tahun 2004 adalah 6,07. Indeks Harga kota Yogyakarta tahun 2004 adalah sebesar 2.847 sedangkan jumlah kabupaten/kota di DIY tahun 2004 adalah sebesar 2.304 jiwa. Kebutuhan fiskal kota yogyakarta tertinggi pada tahun 2000 yaitu sebesar 0,86x dari rata-rata kebutuhan fiskal kabupaten lain di Yogyakarta karena peningkatan indeks harga tahun 2000.

Di awal pelaksanaan otonomi daerah, dimana dana disalurkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah secara *block grant*, penyusunan anggaran dilakukan melalui pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Perencanaan partisipatif ini melibatkan masyarakat pada tingkat paling bawah, sehingga pembangunan yang diprioritaskan adalah kebutuhan masyarakat yang benar-benar dibutuhkan dalam rangka memecahkan masalah yang diidentifikasi bersama dengan potensi lokal yang dimiliki.

Tabel 6.5. Perbandingan Pertumbuhan Kebutuhan Fiskal Kota Yogyakarta dengan Rata-Rata kebutuhan Fiskal Kabupaten/Kota Di Propinsi DIY

Tahun	Kebutuhan Fiskal Kota Yogyakarta	Persen	Rata-rata Kebutuhan Fiskal Kabupaten/kota DIY	Persen
1999	Rp 67,903,735,488.67		Rp 119,441,692,257.72	
2000	Rp 90,466,322,765.06	33.23%	Rp 123,135,765,214.14	3.09%
2001	Rp 68,115,515,095.03	-24.71%	Rp 131,939,092,729.93	7.15%
2002	Rp109,177,997,846.19	60.28%	Rp 144,523,614,580.64	9.54%
2003	Rp136,295,404,748.39	24.84%	Rp 214,563,041,181.80	48.46%
2004	Rp122,338,730,999.92	-10.24%	Rp 288,094,069,187.65	34.27%
	Rata-rata	16,68%	Rata-rata	20.50%

Sumber : Lampiran 3

Berdasarkan tabel 6.5 diatas dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan kebutuhan fiskal Kota Yogyakarta adalah lebih rendah

dinbanding dengan rata-rata pertumbuhan kebutuhan fiskal Kabupaten/Kota di Propinsi DIY.

6.3 Kapasitas Fiskal

Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas fiskal kota Yogyakarta (lampiran) dapat diketahui kapasitas fiskal kota Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel 6.6. Perbandingan Kapasitas Fiskal Kota Yogyakarta dengan Rata-Rata Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota Di Propinsi DIY

Tahun	Kapasitas Fiskal Kota Yogyakarta	Rata-rata Kapasitas Fiskal Kabupaten/kota DIY	Persen
1999	Rp 22,489,737,235.52	Rp 15,558,736,846.25	144.55%
2000	Rp 21,965,068,453.28	Rp 16,039,934,893.04	136.94%
2001	Rp 23,267,083,462.45	Rp 17,186,675,646.63	135.38%
2002	Rp 25,128,436,494.29	Rp 18,825,963,068.89	133.48%
2003	Rp 21,752,004,451.21	Rp 15,483,261,461.60	140.49%
2004	Rp 28,946,653,767.00	Rp 20,789,394,921.88	139.24%
		Rata-rata	138%

Sumber : Lampiran 5

Berdasarkan tabel 6.6 diatas dapat diketahui bahwa rata-rata kapasitas fiskal Kota Yogyakarta adalah lebih tinggi (1,38 x) dibandingkan dengan rata-rata Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota di Propinsi DIY. Kapasitas kota yogyakarta adalah lebih tinggi dari rata-rata kebutuhan fiskal kabupaten/kota lain di Yogyakarta karena potensi industri produk dan jasa. Sedangkan potensi sumberdaya alam lebih rendah dari rata-rata potensi kabupaten/kota lain di Yogyakarta. Potensi Industri dan jasa lebih rendah dari Kabupaten Sleman tetapi lebih tinggi dari 3 Kabupaten lain yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul.

Indeks Potensi Industri Kota Yogyakarta adalah sebesar 38,9%, sedangkan rata-rata Indeks Potensi Industri kabupaten/kota di DIY adalah 20%. Indeks Potensi sumberdaya alam Kota Yogyakarta adalah sebesar 10,7%, sedangkan rata-rata Indeks Potensi Industri kabupaten/kota di DIY adalah 20%. Indeks Potensi sumberdaya manusia Kota Yogyakarta adalah sebesar 34,7%.

Dalam era sebelum otonomi, Pemerintah Pusat terlalu dominan terhadap daerah. Pola pendekatan yang sentralistik dan seragam yang selama ini dikembangkan Pemerintah Pusat telah mematikan inisiatif dan kreativitas daerah. Pemerintah daerah kurang diberi keleluasaan (*local discretion*) untuk menentukan kebijakan daerahnya sendiri. Kewenangan yang selama ini diberikan kepada Daerah tidak disertai dengan pemberian infrastruktur yang memadai, penyiapan sumber daya manusia yang profesional, dan pembiayaan yang adil. Akibatnya, yang terjadi bukannya tercipta kemandirian daerah, tetapi justru ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat.

Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah daerah Kota adalah mennggali potensinya yang dalam hal ini adalah potensi SDM dan Industri. Sejalan dengan tugas yang diemban oleh Pemerintah Daerah, dalam jangka panjang peningkatan APBD diharapkan mampu memberikan stimulus terhadap pertumbuhan perekonomian daerah. Kondisi seperti ini akan tercapai apabila kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat mendorong berkembangnya dunia usaha. Dengan berkembangnya

perekonomian daerah, maka dampak positif juga akan dimikmati oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk penyerapan tenaga kerja, meningkat PAD dan lain sebagainya, sehingga akan bermuara pada penurunan terhadap ketergantungan pada Pemerintah Pusat. Dalam dua tahun pelaksanaan desentralisasi fiskal, dampak positif ini belum dirasakan. Signal-signal penurunan ketergantungan pembiayaan pembangunan daerah pada Pemerintah Pusat belum nampak, bahkan terdapat kecenderungan meningkat. Ketidakterdayaan daerah dalam menggali potensi PAD ini boleh jadi disebabkan oleh kebijakan sebelum otonomi yang selama ini tidak memberikan motivasi kepada daerah untuk menggali potensinya sendiri. Hasil pantauan terhadap sejumlah daerah juga mendukung argumen ini. Di banyak daerah, Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) pada umumnya tidak pernah melakukan usaha-usaha untuk menggali potensi pendapatan daerah. Proyeksi penerimaan daerah pada umumnya hanya didasarkan pada pengalaman penerimaan tahun sebelumnya.

Dalam hal lain, berdasarkan UU No 25 Tahun 1999, ada suatu masalah besar yang akan muncul dengan diberlakukannya UU tersebut, yaitu kemampuan keuangan atau kapasitas/potensi fiskal daerah Kota Yogyakarta. Hal ini penting sekali karena sangat menentukan mampu tidaknya suatu daerah untuk berotonomi. Artinya, daerah otonom harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri.

Keterbatasan potensi kapasitas fiskal daerah dan dihadapkan pada semakin meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah,

memberikan ketergantungan sumber pembiayaan lain dari pemerintah pusat .
Keterbatasan anggaran desentralisasi dan tuntutan kemandirian memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan baik dari daerah maupun untuk memperoleh pinjaman daerah terutama berupa hutang jangka panjang.

Tabel 6.7. Perbandingan Pertumbuhan Kapasitas Fiskal Kota Yogyakarta dengan Rata-Rata Pertumbuhan Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota Di Propinsi DIY

Tahun	Kapasitas Fiskal Kota Yogyakarta	Persen	Rata-rata Kapasitas Fiskal Kabupaten/kota DIY	Persen
1999	Rp 22,489,737,235.52		Rp 15,558,736,846.25	
2000	Rp 21,965,068,453.28	-2.33%	Rp 16,039,934,893.04	3.09%
2001	Rp 23,267,083,462.45	5.93%	Rp 17,186,675,646.63	7.15%
2002	Rp 25,128,436,494.29	8.00%	Rp 18,825,963,068.89	9.54%
2003	Rp 21,752,004,451.21	-13.44%	Rp 15,483,261,461.60	-17.76%
2004	Rp 28,946,653,767.00	33.08%	Rp 20,789,394,921.88	34.27%
	Rata-rata	6.25%	Rata-rata	7.26%

Sumber : Lampiran 5

Berdasarkan tabel 6.7 diatas dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan Kapasitas fiskal Kota Yogyakarta adalah lebih rendah dibanding rata-rata pertumbuhan kapasitas fiskal Kabupaten/Kota di Propinsi DIY.

Potensi/Kapasitas Fiskal perlu terus ditingkatkan dengan meningkatkan potensi sumber-sumber pembiayaan daerah terutama adalah dari pajak industri produk dan jasa di Kota Yogyakarta dalam meningkatkan PAD, tetapi kalau PAD terlalu dipaksakan, akan membebani masyarakat. Kenaikan PAD yang tidak begitu besar nilainya, akan menyebabkan investor tidak jadi menanamkan modalnya atau yang sudah ada pindah ke daerah lain.

Sehingga PAD pada akhirnya bukannya menjadi lebih besar, tapi malah akan turun karena subyeknya semakin berkurang. Oleh karena itu Pemerintah kota Yogyakarta dalam menggali PAD selalu melihat kondisi kemampuan ekonomi masyarakat.

Perbandingan Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal Kota Yogyakarta tahun 1999-2004 dapat dilihat:

Tabel 6.8. Perbandingan Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal Kota Yogyakarta

Tahun	Kebutuhan Fiskal Kota Yogyakarta	Kapasitas Fiskal	Persen
1999	Rp 82,333,279,280.01	Rp 22,489,737,235.52	27.32%
2000	Rp 105,537,711,087.91	Rp 21,965,068,453.28	20.81%
2001	Rp 77,730,370,297.51	Rp 23,267,083,462.45	29.93%
2002	Rp 91,924,026,118.96	Rp 25,128,436,494.29	27.34%
2003	Rp 26,885,450,229.76	Rp 21,752,004,451.21	17.14%
2004	Rp 183,371,264,046.14	Rp 28,946,653,767.00	15.79%
		Rata-rata	23,05%

Sumber : Lampiran 4 dan 5

Berdasarkan tabel 6.8 diatas dapat diketahui bahwa kapasitas fiskal Kota Yogyakarta rata-rata tahun 1999-2004 adalah sebesar 23,5% dari kebutuhan fiskal yang ada menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan fiskal daerah sangat rendah. Pada Tahun 2000 ke tahun 2001 mengalami kenaikan kemampuan pembiayaan. Tetapi pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan. Ini menandakan bahwa kota Yogyakarta semakin tergantung pada pusat dalam membiayai kebutuhannya.

BAB VII

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

7.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis, kemampuan keuangan daerah Kota Yogyakarta dalam menghadapi otonomi Daerah dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Menggunakan metode Derajat Desentralisasi Fiskal di dapatkan hasil bahwa ; porsi pendapatan daerah terhadap penerimaan daerah hanya sebanyak 17% sampai dengan 21%. Hal ini berarti hanya sebagian kecil dari anggaran daerah yang dibiayai oleh sumber-sumber berasal dari daerah. Besarnya rasio bantuan atau subsidi (B) dengan total penerimaan daerah (TPD) adalah antara 46% sampai dengan 59%. Hal ini menunjukkan proporsi Sumbangan dan Bantuan pemerintah pusat terhadap total Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) terdapat proporsi antara 46% sampai dengan 59%. Hal ini mencerminkan masih banyak keuangan yang diperlukan untuk pembiayaan yang perlu dibantu dan di subsidi dari pemerintah pusat. Ini berarti bahwa pembiayaan belanja pembangunan masih sangat tergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat. Rata-rata pertumbuhan rasio PAD/TPD adalah -3.52% (negatif), sedangkan Rata-rata pertumbuhan rasio B/TPD adalah 2.37% (positif), setelah otonomi peranan PAD terhadap struktur penerimaan APBD kota Yogyakarta tidak banyak mengalami perubahan dan semakin tergantung pada pusat.

2. Hasil perhitungan Kebutuhan Fiskal menunjukkan rata-rata kebutuhan fiskal Kota Yogyakarta adalah lebih rendah (0,6 x) dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran Kabupaten/Kota di Propinsi DIY. Hasil perhitungan kapasitas fiskal menunjukkan rata-rata kapasitas fiskal Kota Yogyakarta adalah lebih tinggi (1,38 x) dibandingkan dengan rata-rata PAD Kabupaten/Kota di Propinsi DIY. Namun apabila besarnya kapasitas fiskal dibandingkan dengan kebutuhan fiskal maka anggaran keuangan daerah terhadap pengeluaran daerah di Kota Yogyakarta tahun anggaran 1999-2004 masih terdapat kekurangan yang cukup besar, diharapkan dapat ditutupi melalui mekanisme dana transfer dari pemerintah pusat.

7.2 Implikasi

Hasil diperoleh simpulan dilihat bahwa kemampuan keuangan daerah dilihat dari anggaran keuangan masih kurang dan masih memerlukan bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat yang nilainya cukup besar.. untuk itu perlu diupayakan peningkatan PAD baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi, sehingga peluang-peluang baru sumber penerimaan untuk belanja pembangunan dapat di cari melalui langkah-langkah positif yang perlu dilakukan adalah :

1. Terus berupaya menggali sumber-sumber pendapatan daerah dengan diikuti dengan objek-objek pajak memungkinkan digali secara optimal sehingga biaya belanja pembangunan dapat ditutupi.
2. Dalam alokasi anggaran harus dilakukan efisiensi dan efektifitas, sehingga dapat di perhitungkan nilai manfaat dan biaya secara optimal.

3. Pendataan kembali wajib pajak dan obyek pajak yang sudah ada dalam rangka penggalian potensi daerah.
4. Meningkatkan kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan sehingga kebocoran dapat dikurangi.



DAFTAR PUSTAKA

- Biro Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta (2005), *Yogyakarta dalam Angka Tahun 1999-2004*.
- Biro Pusat Statistik Kota Yogyakarta (2005), *Kota Yogyakarta dalam Angka Tahun 1999-2004*.
- Davey, K.J. (1998), *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*, Jakarta: UI-Press.
- Halim, Abdul (2004), *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta UPP AMP YKPN.
- Hamid, Edy Suandi (2006), *Ekonomi Indonesia: dari Sentralisasi ke Desentralisasi*, Yogyakarta: UII Press.
- _____ (2006), *Formila Alternatif Dana Alokasi Umum(DAU): Upaya Mengatasi Ketimpangan Fiskal dalam era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: UII Press.
- Kaho, Josep (1998), *Prospek Otonomi Daerah di Negara republik Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Mardiasmo (2000), "Paradigma Baru Pengelolaan keuangan Daerah Untuk Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah," Makalah Seminar, HIMMEP, UGM, Yogyakarta.
- _____ (2002), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Syamsi, Ibnu (1986), *Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional*, Jakarta: Rajawali.
- Tabrani (2004), Revisi Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, Diambil 14 Maret 2005, dari <http://www.geogle.com>
- Mamesah, DJ. (1995), *Sistem Administrasi keuangan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Rahayu, S. A. T. (2001), *Peranan Sektor Publik Lokal dan Sektor Swasta dalam Pertumbuhan Ekonomi Regional dan Kesenjangan yang Terjadi di Indonesia (1987-1996)*. *Empirika* 27 (Juli): 1-21.

Republik Indonesia (1999), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta.

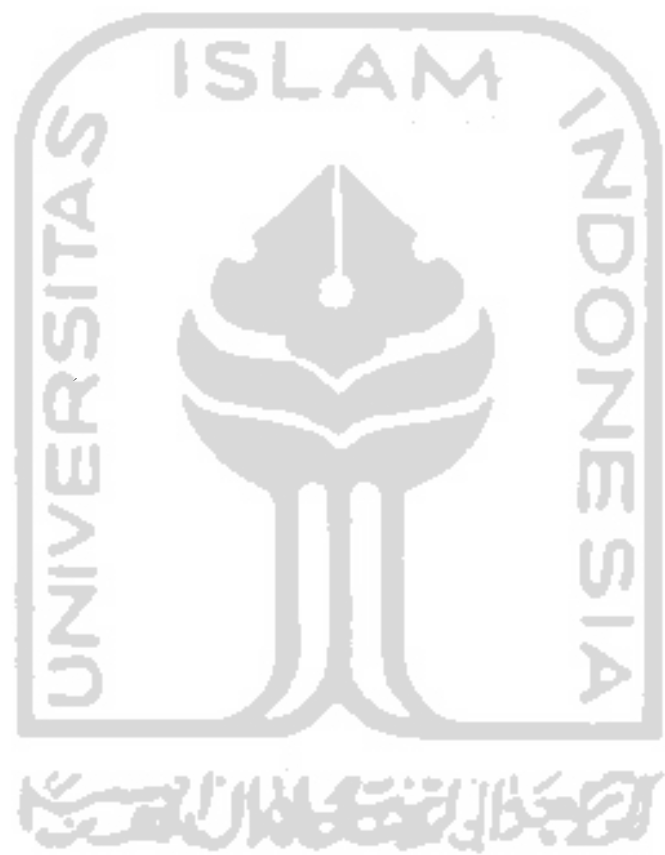
_____ (2004), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta.

_____ (2004), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta.

Wibisono, Y. (2001), Determinan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Empiris Antar Propinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 1, (2): 52-83.



LAMPIRAN



LAMPIRAN 1. Data Variabel Kebutuhan dan Kapasitas Fiskal

	Tahun	PDRB perkapita (Juta Rupiah)	Indeks Harga (Rp)	Luas Wilayah (Ha)	Luas Lahan Sawah Irigasi (Ha)	Penduduk (Jiwa)	IPM (x)	PDRB Pertanian, Tambang & Galian (Juta Rupiah)	PRDB Industri (Juta Rupiah)	Tingkat Kemiskinan (x)
Kota Yogyakarta	1999	2.951.941	2.631	32.50	165	487.115	53.382	1.602.141	1.297.083	2.50
	2000	3.009.980	2.332	32.50	155	493.903	45.846	1.633.264	1.343.973	2.48
	2001	3.532.742	2.630	32.50	143	500.949	38.310	1.650.025	1.379.873	2.29
	2002	3.674.111	2.708	32.50	138	507.427	30.774	1.649.912	1.436.801	2.27
Kab Sleman	2003	3.830.539	2.704	32.50	136	508.678	39.474	1.675.284	1.493.412	2.25
	2004	2.969.743	2.847	32.50	131	516.641	45.846	1.674.836	1.523.062	2.64
	1999	1.826.590	2.490	574.82	23.687	833.603	90.679	1.504.658	1.310.784	4.53
	2000	1.612.172	2.049	574.82	22.889	844.076	95.393	1.451.772	1.239.618	4.63
Kab Kulonprogo	2001	1.649.945	2.286	574.82	22.832	856.558	93.154	1.509.833	1.291.095	4.90
	2002	1.700.303	2.510	574.82	22.809	869.586	82.212	1.578.866	1.348.321	4.91
	2003	1.750.187	2.824	574.82	22.769	880.079	83.907	1.649.081	1.419.658	4.93
	2004	1.797.044	2.782	574.82	22.422	892.319	81.050	1.618.212	1.395.443	4.37
Kab Bantul	1999	932.568	919	586	10.918	435.225	103.752	504.547	375.021	7.91
	2000	951.234	209	586	11.145	43.793	109.145	187.370	173.410	7.85
	2001	989.943	2.352	586	10.962	440.708	106.583	316.711	205.642	8.33
	2002	997.996	1.848	586	10.886	443.819	94.064	247.650	232.150	8.37
Kab Gunung Kidul	2003	1.017.111	2.352	586	10.886	446.843	96.003	381.681	262.647	8.48
	2004	1.016.683	2.231	586	10.935	449.811	92.735	307.396	235.411	7.73
	1999	1.069.848	2.117	649	14.893	575.753	98.564	902.795	524.314	6.89
	2000	1.087.393	1.742	649	14.136	639.726	103.688	871.063	495.847	6.87
Total	2001	1.103.600	1.943	649	14.415	710.807	101.254	905.900	516.438	7.32
	2002	1.130.996	1.131	649	13.729	789.785	89.361	947.320	539.328	7.38
	2003	1.163.245	1.244	649	14.271	792.864	91.203	989.449	567.863	7.42
	2004	1.207.066	1.207	649	14.553	799.211	88.098	970.927	558.177	6.51
Kab Gunung Kidul	1999	792.683	1.011	873	3.494	496.157	134.878	428.865	318.768	9.30
	2000	808.549	230	873	3.566	49.924	141.889	159.265	147.399	9.24
	2001	824.452	2.587	873	3.508	502.407	138.558	269.204	174.796	9.80
	2002	848.297	2.033	873	3.484	505.954	122.283	210.503	197.328	9.85
Total	2003	864.544	2.587	873	3.484	509.401	124.804	324.429	223.250	9.98
	2004	864.181	2.454	873	3.499	512.785	120.556	261.287	200.099	9.09
	1999	7.373.630	9.167	2.716	53.157	2.827.853	481.255	4.943.006	3.825.969	31
	2000	7.469.328	6.562	2.716	51.892	2.071.422	495.960	4.302.734	3.400.247	31
Total	2001	8.080.682	11.798	2.716	51.860	3.011.429	477.858	4.651.673	3.567.844	33
	2002	8.351.703	10.230	2.716	51.046	3.116.571	418.694	4.634.250	3.753.928	33

	2003	8.625.626	11.711	2.716	51.545	3.137.855	435.390	5.019.923	3.986.830	33
	2004	7.854.717	11.521	2.716	51.540	3.170.767	428.285	4.832.658	3.912.193	30



APBD Realization Report Fiscal Summary

Districts in Province Yogyakarta

No.	Tahun	TOTAL REVENUE (non cash and counting) (Rp)	Original Province Income (Rp)	TOTAL ROUTINE EXPENSE (non cash and counting) (Rp)	TOTAL DEVELOPMENT EXPENSE (non cash and counting) (Rp)	TOTAL EXPENSES (non cash and counting) (Rp)
1	2	3	4	5	8	7
1	1998/1999	846,211,795,367.26	77,793,684,231.26	477,352,609,733.40	119,855,851,555.18	597,208,461,288.58
2	1999/2000	872,383,294,193.05	80,199,674,465.22	492,116,092,508.66	123,562,733,562.05	615,678,826,070.71
3	2000	934,752,467,314.48	85,933,378,233.16	527,298,877,385.24	132,396,586,264.39	659,695,463,649.63
4	2001	1,023,910,370,453.95	94,129,815,344.44	577,593,328,461.18	145,024,744,442.00	722,618,072,903.18
5	2002	1,049,910,406,310.00	77,416,307,308.00	888,840,841,225.00	183,974,364,684.00	1,072,815,205,909.00
6	2003	1,409,716,042,289.01	103,946,974,609.41	1,193,447,731,716.81	247,022,614,221.42	1,440,470,345,938.22
7	2004	1,175,639,982,230.70	86,687,116,920.59	995,281,906,440.25	206,005,786,330.06	1,201,287,692,770.31

Lampiran 3 Perhitungan Kebutuhan Fiskal Kota Yogyakarta

A. Perhitungan Kebutuhan Fiskal Kota Yogyakarta

Perhitungan Kebutuhan Fiskal Kota Yogyakarta menggunakan formula sebagai berikut:

$$F_{Ni} = \overline{Png} (\alpha_1 P_i + \alpha_2 W_i + \alpha_3 K_i + \alpha_4 K_{mi} + \alpha_5 K_{bi})$$

Dimana:

$$\overline{Png} = \frac{\sum_{j=1}^n Png_j}{n}$$

\overline{Png} = pengeluaran daerah rata-rata seluruh daerah

α = merupakan bobot masing-masing variabel yang dihitung dari persamaan ekonometrika.

Perhitungan Kebutuhan Fiskal Kota Yogyakarta dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perhitungan Bobot Kebutuhan Fiskal Per variabel

a. Bobot Kebutuhan Fiskal Variabel Luas Wilayah

Untuk menghitung Bobot Kebutuhan Fiskal berdasarkan variabel Luas Wilayah dilakukan dengan membagi Luas wilayah Kota Yogyakarta dengan Luas wilayah propinsi DIY. Luas wilayah kota Yogyakarta tahun 1998-2004 adalah 32,5 Ha, sedangkan luas wilayah propinsi DIY adalah 2.716 Ha sehingga bobot luas wilayah kota Yogyakarta dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Bobot 1998} = \frac{32,5}{2.716} = 0,01$$

Karena Luas wilayah Kota Yogyakarta dan Luas wilayah propinsi DIY dari tahun 1998-2004 adalah tetap maka bobot Kebutuhan Fiskal berdasarkan variabel luas wilayah adalah tetap untuk tahun 1998-2004.

b. Bobot Kebutuhan Fiskal Variabel Jumlah Penduduk

Untuk menghitung Bobot Kebutuhan Fiskal berdasarkan variabel Jumlah Penduduk dilakukan dengan membagi Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta dengan Jumlah Penduduk propinsi DIY.

$$\text{Bobot 1999} = \frac{487,115}{2,827,853} = 0,17$$

$$\text{Bobot 2000} = \frac{493,903}{2,071,422} = 0,24$$

$$\text{Bobot 2001} = \frac{500,949}{3,011,429} = 0,17$$

$$\text{Bobot 2002} = \frac{507,427}{3,116,571} = 0,16$$

$$\text{Bobot 2003} = \frac{508,678}{3,137,855} = 0,16$$

$$\text{Bobot 2004} = \frac{516,641}{3,170,767} = 0,16$$

c. Bobot Kebutuhan Fiskal Variabel Tingkat Kemiskinan

Untuk menghitung Bobot Kebutuhan Fiskal berdasarkan variabel Tingkat Kemiskinan dilakukan dengan membagi Tingkat Kemiskinan Kota Yogyakarta dengan Tingkat Kemiskinan propinsi DIY. Data tingkat kemiskinan didapat dari data sekunder Indeks kemiskinan kabupaten/kota di indonesia (Data BKKBN) tahun 1998-2004.

$$\text{Bobot 1999} = \frac{2,50}{31} = 0,8$$

$$\text{Bobot 2000} = \frac{2,48}{31} = 0,8$$

$$\text{Bobot 2001} = \frac{2,29}{33} = 0,7$$

$$\text{Bobot 2002} = \frac{2,27}{33} = 0,7$$

$$\text{Bobot 2003} = \frac{2,25}{33} = 0,7$$

$$\text{Bobot 2004} = \frac{2,64}{30} = 0,9$$

d. Bobot Kebutuhan Fiskal Variabel Indeks harga

Untuk menghitung Bobot Kebutuhan Fiskal berdasarkan variabel Indeks harga dilakukan dengan membagi Indeks harga Kota Yogyakarta dengan Indeks harga propinsi DIY. Data Indeks harga didapat dari data sekunder BPS Yogyakarta tahun 1998-2004.

$$\text{Bobot 1999} = \frac{2,631}{9,167} = 0,29$$

$$\text{Bobot 2000} = \frac{2,332}{6,562} = 0,36$$

$$\text{Bobot 2001} = \frac{2,630}{11,798} = 0,22$$

$$\text{Bobot 2002} = \frac{2,708}{10,230} = 0,26$$

$$\text{Bobot 2003} = \frac{2,704}{11,711} = 0,23$$

$$\text{Bobot 2004} = \frac{2,847}{11,521} = 0,25$$

2. Perhitungan Bobot Kebutuhan Fiskal Seluruh variabel

Untuk menghitung Bobot Kebutuhan Fiskal seluruh variabel dilakukan dengan menghitung total bobot yaitu menjumlahkan bobot keseluruhan variabel. Perhitungan Bobot Kebutuhan Fiskal Seluruh variabel untuk kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

$$\text{Bobot Tahun 1999} = 0.01 + 0.17 + 0.08 + 0.29 = 0,55$$

$$\text{Bobot Tahun 2000} = 0.01 + 0.24 + 0.08 + 0.36 = 0,69$$

$$\text{Bobot Tahun 2001} = 0.01 + 0.17 + 0.07 + 0.22 = 0,47$$

$$\text{Bobot Tahun 2002} = 0.01 + 0.16 + 0.07 + 0.26 = 0,51$$

$$\text{Bobot Tahun 2003} = 0.01 + 0.16 + 0.07 + 0.231 = 0,47$$

$$\text{Bobot Tahun 2004} = 0.01 + 0.16 + 0.09 + 0.25 = 0,51$$

Perhitungan diatas juga dilakukan untuk 4 kabupaten yang lain. (Hasil selengkapnya dapat dilihat dalam Lampiran 4).

3. Perhitungan pengeluaran daerah rata-rata propinsi DIY

Berdasarkan data lampiran 2 dapat diketahui pengeluaran rata-rata daerah propinsi DIY. Berdasarkan perhitungan tahap 1-3 juga didapat bobot kebutuhan fiskal untuk Kota Yogyakarta. Data pengeluaran rata-rata daerah propinsi DIY dan bobot kebutuhan fiskal untuk Kota Yogyakarta dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	Tahun	Rata-rata Pengeluaran 5 Kabupaten/Kota Propinsi DIY	bobot kebutuhan fiskal Kota Yogyakarta
1	2	3	
1	1999/2000	Rp 123,135,765,214.14	0.55
2	2000	Rp 131,939,092,729.93	0.69
3	2001	Rp 144,523,614,580.64	0.47
4	2002	Rp 214,563,041,181.80	0.51
5	2003	Rp 288,094,069,187.65	0.47
6	2004	Rp 119,441,692,257.72	0.51

4. Perhitungan Kebutuhan Fiskal

Kebutuhan Fiskal Kota Yogyakarta dapat diketahui dengan mengalikan bobot kebutuhan fiskal untuk Kota Yogyakarta dengan pengeluaran rata-rata daerah propinsi DIY seagai berikut:

$$\text{Tahun 1999} = 0,55 \times 123,135,765,214.14 = \text{Rp } 67,903,735,488.67$$

$$\text{Tahun 2000} = 0,69 \times 131,939,092,729.93 = \text{Rp } 90,466,322,765.06$$

$$\text{Tahun 2001} = 0,47 \times 144,523,614,580.64 = \text{Rp } 68,115,515,095.03$$

$$\text{Tahun 2002} = 0,12 \times 214,563,041,181.80 = \text{Rp } 109,177,997,846.19$$

$$\text{Tahun 2003} = 0,51 \times 288,094,069,187.65 = \text{Rp } 136,295,404,748.39$$

$$\text{Tahun 2004} = 0,55 \times 119,441,692,257.72 = \text{Rp } 122,338,730,999.92$$

B. Perhitungan Kapasitas Fiskal Kota Yogyakarta

Perhitungan Kapasitas Fiskal Kota Yogyakarta menggunakan formula sebagai berikut:

$$FC_i = (0,75S_i) + (IPM_i + Y_i)PADI$$

dimana:

FC_i = Kapasitas Fiskal Kota Yogyakarta

S_i = Bagi hasil Sumber Daya Alam Kota Yogyakarta

IPMi = Potensi Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta
Yi = Potensi Industri Kota Yogyakarta
PADi = PAD propinsi DIY

Perhitungan Kapasitas Fiskal Kota Yogyakarta dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perhitungan Bobot Kapasitas Fiskal Per variabel

a. Bobot Kapasitas Fiskal Variabel Sumber Daya Alam

Untuk menghitung Bobot Kapasitas Fiskal berdasarkan variabel Sumber Daya Alam dilakukan dengan membagi potensi Sumber Daya Alam Kota Yogyakarta dengan potensi Sumber Daya Alam DIY. Potensi Sumber daya Alam dilihat dari PDRB Petanian, Tambang & Galian. Hasil perhitungan bobot dikalikan dengan 0,75 untuk biaya-biaya penurunan kualitas lingkungan.

$$\text{Bobot 1999} = 0,75 \times \frac{1,602,141}{4,943,006} = 0,324$$

$$\text{Bobot 2000} = 0,75 \times \frac{1,633,264}{4,302,734} = 0,380$$

$$\text{Bobot 2001} = 0,75 \times \frac{1,650,025,9}{4,651,673} = 0,355$$

$$\text{Bobot 2002} = 0,75 \times \frac{1,649,912}{4,634,250} = 0,356$$

$$\text{Bobot 2003} = 0,75 \times \frac{1,675,284}{5,019,923} = 0,334$$

$$\text{Bobot 2004} = 0,75 \times \frac{1,674,836}{4,832,658} = 0,347$$

b. Bobot Kapasitas Fiskal Variabel Potensi Sumber Daya Manusia

Untuk menghitung Bobot Kapasitas Fiskal berdasarkan variabel Potensi Sumber Daya Manusia dilakukan dengan membagi Potensi Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta dengan Potensi Sumber Daya Manusia propinsi DIY. Data Potensi Sumber Daya Manusia didapat dari data sekunder Indeks Potensi Sumber Daya Manusia kabupaten/kota di Indonesia (Data BPS) tahun 1998-2004.

$$\text{Bobot 1999} = \frac{53,382}{481,255} = 0,111$$

$$\text{Bobot 2000} = \frac{45,846}{495,960} = 0,092$$

$$\text{Bobot 2001} = \frac{38,310}{477,858} = 0,080$$

$$\text{Bobot 2002} = \frac{30,774}{418,694} = 0,073$$

$$\text{Bobot 2003} = \frac{39,474}{435,390} = 0,091$$

$$\text{Bobot 2004} = \frac{45,846}{428,285} = 0,107$$

c. Bobot Kapasitas Fiskal Variabel Potensi Industri

Untuk menghitung Bobot Kapasitas Fiskal berdasarkan variabel Potensi Industri dilakukan dengan membagi Potensi Industri Kota Yogyakarta dengan Potensi Industri propinsi DIY. Data Potensi Industri didapat dari data PDRB Industri dari data BPS Yogyakarta tahun 1998-2004.

$$\text{Bobot 1999} = \frac{1,297,083}{3,825,969} = 0,31$$

$$\text{Bobot 2000} = \frac{1,343,973}{3,400,247} = 0,31$$

$$\text{Bobot 2001} = \frac{1,379,873}{3,400,247} = 0,33$$

3,567,844

$$\text{Bobot 2002} = \frac{1,436,801}{3,753,928} = 0,33$$

$$\text{Bobot 2003} = \frac{1,493,412}{3,966,830} = 0,33$$

$$\text{Bobot 2004} = \frac{1,523,062}{3,912,193} = 0,30$$

2. Perhitungan Bobot Kapasitas Fiskal Seluruh variabel

Untuk menghitung Bobot Kapasitas Fiskal seluruh variabel dilakukan dengan menghitung rata-rata bobot yaitu menjumlahkan bobot keseluruhan variabel kemudian dibagi 3 (jumlah variabel adalah 4). Perhitungan Bobot Kapasitas Fiskal Seluruh variabel untuk kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

$$\text{Bobot Tahun 1999} = \frac{0.111 + 0.324 + 0.339}{3} = 0,26$$

$$\text{Bobot Tahun 2000} = \frac{0.092 + 0.380 + 0.395}{3} = 0,29$$

$$\text{Bobot Tahun 2001} = \frac{0.080 + 0.355 + 0.387}{3} = 0,27$$

$$\text{Bobot Tahun 2002} = \frac{0.073 + 0.356 + 0.383}{4} = 0,27$$

$$\text{Bobot Tahun 2003} = \frac{0.091 + 0.334 + 0.376}{3} = 0,27$$

$$\text{Bobot Tahun 2004} = \frac{0.107 + 0.347 + 0.389}{3} = 0,28$$

Perhitungan diatas juga dilakukan untuk 4 kabupaten yang lain. (Hasil selengkapnya dapat dilihat dalam Lampiran 5).

3. Perhitungan Pendapatan Asli Daerah Propinsi DIY

Berdasarkan data lampiran 2 dapat diketahui Pendapatan Asli Daerah Propinsi DIY. Berdasarkan perhitungan tahap 1-2 juga didapat bobot Kapasitas Fiskal untuk Kota Yogyakarta. Data pengeluaran rata-rata daerah propinsi DIY dan bobot Kapasitas Fiskal untuk Kota Yogyakarta dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	Tahun	PAD Propinsi DIY	bobot Kapasitas Fiskal Kota Yogyakarta
1	2	3	
1	1999/2000	80,199,674,465.22	0.26
2	2000	85,933,378,233.16	0.29
3	2001	94,129,815,344.44	0.27
4	2002	77,416,307,308.00	0.27
5	2003	103,946,974,609.41	0.27
6	2004	86,687,116,920.59	0.28

4. Perhitungan Kapasitas Fiskal

Kapasitas Fiskal Kota Yogyakarta dapat diketahui dengan mengalikan bobot Kapasitas Fiskal untuk Kota Yogyakarta dengan pengeluaran rata-rata daerah propinsi DIY seagai berikut:

$$\text{Tahun 1999} = 0,26 \times 80,199,674,465.22 = \text{Rp } 22,489,737,235.52$$

$$\text{Tahun 2000} = 0,29 \times 85,933,378,233.16 = \text{Rp } 21,965,068,453.28$$

$$\text{Tahun 2001} = 0,27 \times 94,129,815,344.44 = \text{Rp } 23,267,083,462.45$$

$$\text{Tahun 2002} = 0,27 \times 77,416,307,308.00 = \text{Rp } 25,128,436,494.29$$

Tahun 2003 = $0,27 \times 103,946,974,609.41 = \text{Rp } 21,752,004,451.21$

Tahun 2004 = $0,28 \times 86,687,116,920.59 = \text{Rp } 28,946,653,767.00$



Lampiran 4 Hasil Perhitungan Kebutuhan Fiskal

	Tahun	Bobot (x)				Bobot Kebutuhan Fiskal (x)	Kebutuhan Fiskal (Rp)
		Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Tingkat Kemiskinan	Indeks Harga		
Kota Yogyakarta	1999	0.01	0.17	0.08	0.29	0.55	Rp 67.903.735.488.67
	2000	0.01	0.24	0.08	0.36	0.69	Rp 90.466.322.765.06
	2001	0.01	0.17	0.07	0.22	0.47	Rp 68.115.515.095.03
	2002	0.01	0.16	0.07	0.26	0.51	Rp 109.177.997.846.19
	2003	0.01	0.16	0.07	0.23	0.47	Rp 136.295.404.748.39
Kab. Sleman	2004	0.01	0.16	0.09	0.25	0.51	Rp 122.338.730.999.92
	1999	0.21	0.29	0.15	0.27	0.92	Rp 113.738.243.272.22
	2000	0.21	0.41	0.15	0.31	1.08	Rp 142.564.493.312.76
	2001	0.21	0.28	0.15	0.19	0.84	Rp 121.387.886.358.11
	2002	0.21	0.28	0.15	0.25	0.89	Rp 190.078.173.611.78
Kab. Kulonprogo	2003	0.21	0.28	0.15	0.24	0.88	Rp 254.210.134.677.18
	2004	0.21	0.28	0.14	0.24	0.88	Rp 211.098.825.517.54
	1999	0.22	0.15	0.25	0.10	0.72	Rp 89.152.916.208.44
	2000	0.22	0.02	0.25	0.03	0.52	Rp 68.817.288.790.21
	2001	0.22	0.15	0.26	0.20	0.82	Rp 118.052.047.575.79
Kab. Bantul	2002	0.22	0.14	0.26	0.18	0.79	Rp 170.409.403.573.64
	2003	0.22	0.14	0.26	0.20	0.82	Rp 234.999.133.802.96
	2004	0.22	0.14	0.25	0.19	0.81	Rp 193.661.055.012.78
	1999	0.24	0.20	0.22	0.23	0.89	Rp 110.187.837.518.63
	2000	0.24	0.31	0.22	0.27	1.03	Rp 136.466.109.997.79
Kab. Gunung Kidul	2001	0.24	0.24	0.22	0.16	0.86	Rp 124.876.005.365.38
	2002	0.24	0.25	0.23	0.11	0.83	Rp 177.703.828.284.51
	2003	0.24	0.25	0.22	0.11	0.82	Rp 236.881.072.749.93
	2004	0.24	0.25	0.21	0.10	0.81	Rp 194.682.316.508.35
	1999	0.32	0.18	0.30	0.11	0.91	Rp 111.560.328.368.61
Rata-rata Pengeluaran	2000	0.32	0.02	0.30	0.04	0.68	Rp 89.442.156.053.87
	2001	0.32	0.17	0.30	0.22	1.01	Rp 145.663.203.928.23
	2002	0.32	0.16	0.30	0.20	0.98	Rp 210.882.761.411.08
	2003	0.32	0.16	0.30	0.22	1.01	Rp 289.990.530.772.12
	2004	0.32	0.16	0.30	0.21	1.00	Rp 239.249.226.177.67
Rata-rata Pengeluaran	1999	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	Rp 123.135.765.214.14
	2000	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	Rp 131.939.092.729.93
	2001	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	Rp 144.523.614.580.64
	2002	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	Rp 214.563.041.181.80
	2003	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	Rp 288.094.069.187.65
2004	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	Rp 240.257.538.554.06	

Lampiran 5 Hasil Perhitungan Kapasitas Fiskal

	Tahun	IPM	Bobot (x)			Bobot Kapasitas Fiskal (x)	Kapasitas Fiskal (Rp)
			PDRB Pertanian, Tambang & Galian	PRDB Industri			
Kota Yogyakarta	1999		0.111	0.324	0.339	0.26	Rp 22.489.737.235.52
	2000		0.092	0.380	0.395	0.29	Rp 21.965.068.453.28
	2001		0.080	0.355	0.387	0.27	Rp 23.267.083.462.45
	2002		0.073	0.356	0.383	0.27	Rp 25.128.436.494.29
	2003		0.091	0.334	0.376	0.27	Rp 21.752.004.451.21
Kab. Sleman	2004		0.107	0.347	0.389	0.28	Rp 28.946.653.767.00
	1999		0.188	0.304	0.343	0.28	Rp 23.190.648.356.49
	2000		0.192	0.337	0.365	0.30	Rp 23.562.343.310.60
	2001		0.195	0.325	0.362	0.29	Rp 25.671.863.054.94
	2002		0.196	0.341	0.359	0.30	Rp 27.583.338.824.98
Kab. Kulonprogo	2003		0.193	0.329	0.358	0.29	Rp 22.729.016.304.97
	2004		0.189	0.335	0.357	0.29	Rp 14.402.858.047.58
	1999		0.216	0.102	0.098	0.14	Rp 8.158.330.872.42
	2000		0.220	0.044	0.051	0.10	Rp 9.323.643.086.57
	2001		0.223	0.068	0.058	0.12	Rp 9.737.440.037.85
Kab. Bantul	2002		0.225	0.053	0.062	0.11	Rp 11.381.634.657.55
	2003		0.220	0.076	0.066	0.12	Rp 8.781.797.385.01
	2004		0.217	0.064	0.060	0.11	Rp 18.172.997.010.02
	1999		0.205	0.183	0.137	0.17	Rp 14.452.399.588.48
	2000		0.209	0.202	0.146	0.19	Rp 14.740.325.260.57
Kab. Gunung Kidul	2001		0.212	0.195	0.145	0.18	Rp 16.084.291.948.29
	2002		0.213	0.204	0.144	0.19	Rp 17.248.690.978.82
	2003		0.209	0.197	0.143	0.18	Rp 14.174.561.313.16
	2004		0.206	0.201	0.143	0.18	Rp 15.603.859.648.32
	1999		0.280	0.087	0.063	0.15	Rp 9.502.568.178.35
Total	2000		0.286	0.037	0.043	0.12	Rp 10.608.294.355.19
	2001		0.290	0.058	0.049	0.13	Rp 11.172.699.728.63
	2002		0.292	0.045	0.053	0.13	Rp 12.787.714.388.80
	2003		0.287	0.065	0.056	0.14	Rp 9.978.927.853.64
	2004		0.281	0.054	0.051	0.13	Rp 103.946.974.609.41
Total	1999		1.000	1.000	1.000	1.000	Rp 77.793.684.231.26
	2000		1.000	1.000	1.000	1.000	Rp 80.199.674.465.22
	2001		1.000	1.000	1.000	1.000	Rp 85.933.378.233.16
	2002		1.000	1.000	1.000	1.000	Rp 94.129.815.344.44
	2003		1.000	1.000	1.000	1.000	Rp 77.416.307.308.00
2004		1.000	1.000	1.000	1.000	Rp 103.946.974.609.41	